



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2026
KABUPATEN



Laporan Kinerja

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TRIWULANI

TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Kendari, 20 April 2026

Disetujui oleh:

Penanggung Jawab,
Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rasdiana Alimuddin, S.Pi

Disusun oleh:

Ketua Tim,
Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rasdiana Alimuddin, S.Pi

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja PPS Kendari Triwulan I Tahun 2026 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi PPS Kendari kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada tahun 2020 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (*base line*) untuk menetapkan target pada tahun - tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan di tahun 2026.

Melalui laporan ini diharapkan agar pembaca dapat memahami upaya - upaya yang telah dilakukan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja bersama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Diharapkan pula agar diperoleh masukan dan saran yang positif guna perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada tahun berikutnya.

Kendari, 20 April 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
EXECUTIVE SUMMARY	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	11
1.1 LATAR BELAKANG	11
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	12
1.3 SDM PELABUHAN	14
1.4 PERMASALAHAN	15
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	19
BAB II	21
PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2026 - 2029	21
2.2 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN	25
2.3 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026	27
2.4 RENCANA AKSI	30
BAB III	34
AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
3.2 REALISASI ANGGARAN	84
BAB IV	85
PENUTUP	85
4.1. KESIMPULAN	85
4.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA	85
4.3. REKOMENDASI TINDAK LANJUT	86
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi ASN PPS Kendari Tahun 2026 Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	15
Tabel 2. Indikator Kinerja Tahun 2026 Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.....	28
Tabel 3. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2026.....	30
Tabel 4. Rencana Aksi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2026.....	30
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Triwulan I Tahun 2026.....	34
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja "Penerimaan PNBPN non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2026	37
Tabel 7. Laporan Target & Realisasi PNBPN Per Akun Triwulan I Tahun 2026	37
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja "Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2026	41
Tabel 9. Capaian Bulanan Indikator Kinerja "Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2026.....	44
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja "Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2026.....	46
Tabel 11. Capaian Bulanan Indikator Kinerja "Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2026	48
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2026	50
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja "Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2026	55
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja "Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan" Triwulan I Tahun 2026.....	58
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja "Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2026.....	64
Tabel 16. Kategori Penilaian Mandiri SAKIP	67
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja "Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2026	75

Tabel 18. Hasil Perhitungan Capaian "Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2026	76
Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2026	81
Tabel 20. Pagu dan Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Jenis Belanja	84
Tabel 21. Pagu dan Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Kegiatan	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2026	14
Gambar 2. Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2026-2045 Tahap I	22
Gambar 3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru	24
Gambar 4. Kegiatan Penunjang Pencapaian PNBPN Non SDA	40
Gambar 5. Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap	43
Gambar 6. Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU Permohonan Pengusahaan	45
Gambar 7. Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU Tingkat Kesyahbandaran	49
Gambar 8. Kegiatan Sosialisasi Pengantrian Pengambilan Subsidi BBM	49
Gambar 9. Kerusakan jaringan kabel bawah tanah dari kubikel menuju panel listrik utama	51
Gambar 10. Ledakan kabel jaringan listrik PLN	51
Gambar 11. Inspeksi Kepatuhan Tenan Kawasan PPS.....	51
Gambar 12. Kunjungan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Gubernur Sulawesi Tenggara, serta Bupati Konawe ke Lokasi KNMP Sorue Jaya.....	52
Gambar 13. Rapat Koordinasi Persiapan Peresmian KNMP Sorue Jaya.....	53
Gambar 14. Kegiatan MC-0 dan Peletakan Batu Pertama KNMP Kabupaten Muna	53
Gambar 15. Penimbangan Sampah Kapal Perikanan di PPS Kendari	56
Gambar 16. Kegiatan Penunjang Lainnya Pencapaian Nilai Pengendalian Lingkungan	57
Gambar 17. Kegiatan Penunjang Pencapaian Kapal Perikanan Izin Daerah.....	60
Gambar 18. Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2026	62
Gambar 19. Pemberian Penghargaan kepada ASN dan NON ASN Terbaik Triwulan II Tahun 2025 dan Penunjukan Agen Perubahan PPS Kendari Tahun 2026	63
Gambar 20. Imbauan Stop Gratifikasi	63
Gambar 21. Kegiatan Penunjang Pencapaian Presentase Hasil Pengawasan Triwulan I	66
Gambar 22. Perjanjian Kinerja Tahun 2026	68
Gambar 23. Perjanjian Kinerja Tahun Perubahan I Tahun 2026.....	68
Gambar 24. Dokumen rencana aksi, manual IKU, dan rincian indikator kinerja.....	69
Gambar 25. Perhitungan Dimensi Kualifikasi Pendidikan IP ASN	71
Gambar 26. Perhitungan Dimensi Kompetensi IP ASN.....	71
Gambar 27. Perhitungan Dimensi Kinerja IP ASN	72
Gambar 28. Perhitungan Dimensi Disiplin IP ASN	72
Gambar 29. Kategori Penilaian Tingkat IP ASN.....	73
Gambar 30. Pemberitahuan terkait IP ASN melalui <i>Whatsapp Group</i> PPS Kendari.....	74
Gambar 31. Pembinaan Pegawai PPS Kendari Tahun 2026.....	74

Gambar 32. Rapat Evaluasi Pelayanan PPS Kendari Tahun 2025.....	83
Gambar 33. Publikasi Nilai SKM Triwulan I pada Sosial Media.....	83

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian PNBPNon SDA Triwulan I	38
Grafik 2. Perbandingan Capaian IKU Penerimaan PNBPNon SDA Triwulan I Tahun 2021 - 2026.....	39
Grafik 3. Rekapitulasi Jumlah Produksi Triwulan I PPS Kendari	41
Grafik 4. Capaian Nilai Produksi Triwulan I PPS Kendari	41
Grafik 5. Perbandingan Capaian Volume Produksi	42
Grafik 6. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Triwulan I Tahun 2026.....	47
Grafik 7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Triwulan I Tahun 2021-2026.....	47
Grafik 8. Capaian Bulanan Nilai Pengendalian Lingkungan.....	55
Grafik 9. Perbandingan Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan.....	55
Grafik 10. Rekapitulasi Capaian Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) Triwulan I	59
Grafik 11. Perbandingan Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah Triwulan I.....	59
Grafik 12. Grafik Capaian Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan Triwulan I.....	64
Grafik 13. Perbandingan Capaian Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan Triwulan I...65	65
Grafik 14. Grafik Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I	81
Grafik 15. Perbandingan Capaian SKM Triwulan I Tahun 2024 – 2026.....	82

EXECUTIVE SUMMARY

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan sebagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama untuk memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasi sebuah tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Secara umum capaian tata kelola pemerintahan yang baik seperti ditargetkan dalam Renstra 2026-2029, menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun beberapa indikator masih memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap khususnya Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, namun juga komitmen, keterlibatan seluruh pihak terkait dalam mewujudkan akuntabilitasnya. Secara kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari mendapatkan total Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114.2 sebagaimana *dashboard* di bawah ini:



Dari 5 sasaran Kegiatan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja, sebanyak 5 (lima) IKU & IKM yang bernilai Istimewa (nilai di atas 110), dan 3 (Tiga) IKU & IKM yang bernilai Baik (nilai 90- <110).

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2026 telah dikeluarkan anggaran sebesar **Rp5.616.972.701** atau **10,64%** dari Pagu sebesar **Rp56.591.349.000** Bagaimanapun juga sesuai dengan intruksi Presiden RI bahwa penyerapan Anggaran setiap instansi pemerintah harus lebih optimal, jika perlu harus mendekati angka 98%, hal itu artinya bahwa anggaran yang mampu diserap pada akhirnya akan

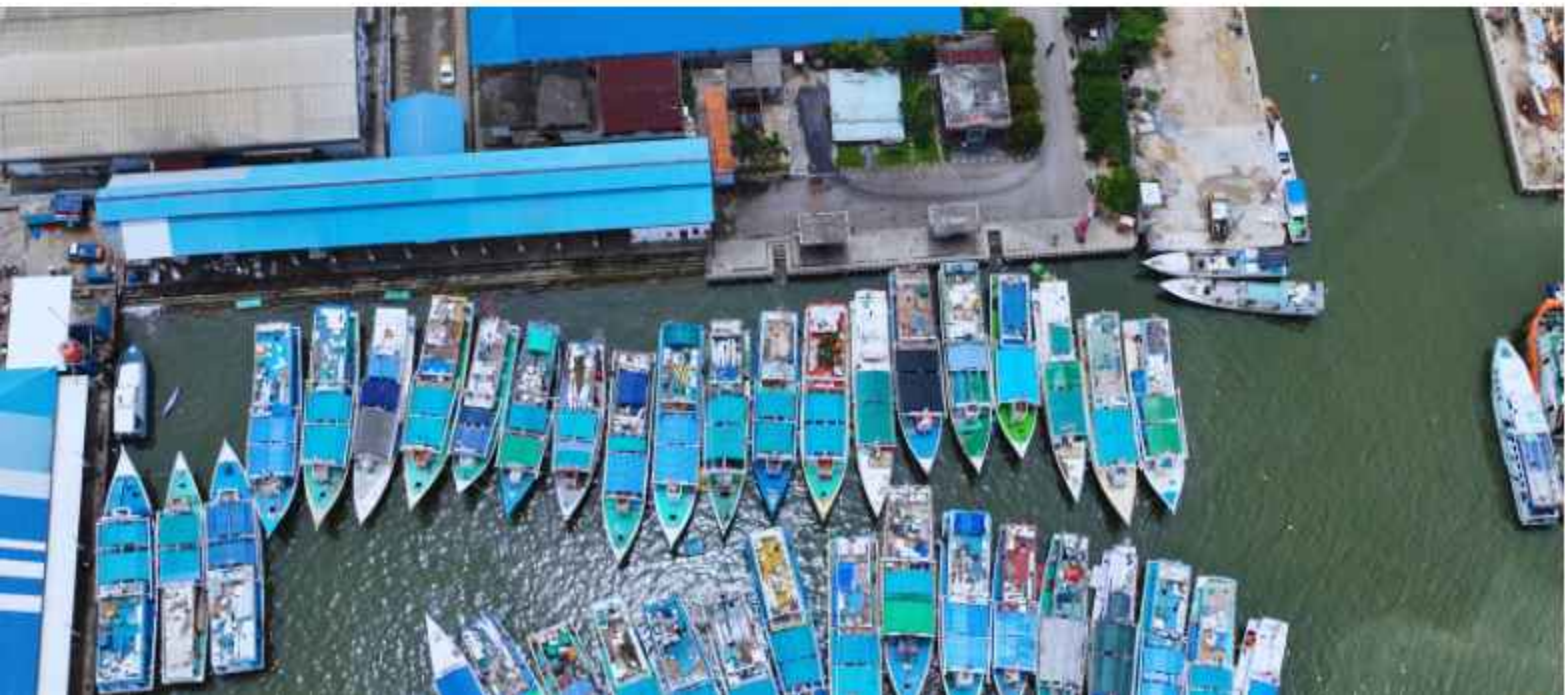
bergulir kepada masyarakat sehingga perekonomian secara nasional berkembang dengan baik dan mampu mensejahterakan masyarakat. Namun demikian, efisien penggunaan anggaran tetap harus dikedepankan, khususnya efisiensi yang berasal dari pengadaan barang/jasa, dan penghematan lainnya yang dianggap perlu dengan tidak mengurangi efektifitas organisasi dalam melaksanakan pencapaian sasaran strategis masing – masing.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Tugas dan Fungsi
SDM Pelabuhan
Permasalahan
Sistematika Penyajian

.....11
.....12
.....14
.....15
.....19



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari melaksanakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggung jawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindak lanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi : pertanggung jawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, (2) sebagai upaya

perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2026 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2026 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggung jawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) bisa diwujudkan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan *LogBook*;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;

12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;
13. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

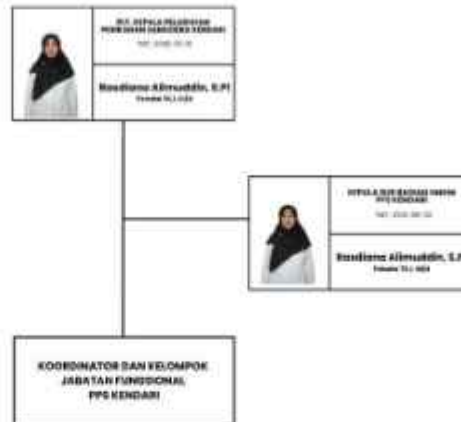
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, sebagai berikut:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, maka struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

**STRUKTUR ORGANISASI
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026**



Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2026

1.3 SDM PELABUHAN

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Sedangkan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Adapun komposisi pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera Samudera Kendari berjumlah 138 orang yang terdiri 96 orang ASN, 22 orang Jasa Lainnya Perorangan, dan 20 orang outsourcing. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini merupakan aset untuk

mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Komposisi ASN PPS Kendari Tahun 2026 Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD
1	Laki-Laki		7	19	20	5	29		80
2	Perempuan		3	7	1		5		16
	Jumlah		10	24	21	5	34		96

1.4 PERMASALAHAN

Secara umum Perikanan tangkap memiliki permasalahan yang cukup kompleks karena terkait dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Ada berbagai isu yang muncul saat ini terkait dengan pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian SDI dan lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan. Praktek-praktek IUU Fishing yang terjadi baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia maupun oleh kapal-kapal perikanan asing yang menyebabkan kerugian dari berbagai aspek.

Kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia masih lemah, untuk itu kapasitas dan kapabilitas petugas pengawasan harus terus ditingkatkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap di Indonesia. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) permasalahan utama, yakni sebagai berikut:

- 1) Kapasitas Nelayan; Rendahnya kemampuan nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan produktif dan efisien serta yang ramah lingkungan, dan rendahnya pengetahuan nelayan tentang cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan, karena itu PPS Kendari terus melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran pelaku utama terutama nelayan.

- 2) Kesejahteraan Nelayan; Belum terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga nelayan serta rendahnya kemampuan nelayan dalam mengakses sumber permodalan dan mengelola keuangan dalam menghadapi kerentanan usaha penangkapan ikan terhadap perubahan lingkungan dan cuaca.
- 3) Mindset Masyarakat Perikanan Tangkap; Usaha penangkapan ikan masih terbatas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan jangka menengah, belum sampai sepenuhnya pada upaya mendukung industrialisasi ataupun menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan
- 4) Sarana Prasarana Usaha Penangkapan Ikan; Belum optimalnya infrastruktur pelabuhan perikanan, konektivitas sistem informasi yang kurang, struktur armada kapal perikanan yang didominasi kapal kecil dengan jangkauan yang terbatas, minimnya armada kapal perikanan yang memenuhi laik tangkap dan laik simpan, kurangnya pendataan kapal dan alat penangkapan ikan yang *reliable*, minimnya penyerapan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien
- 5) Konektivitas Analisis dan Pemantauan Pemanfaatan Usaha; Belum jelasnya mekanisme pendataan nelayan kecil, serta belum optimalnya integrasi perizinan usaha antara pusat-daerah, dan kurangnya intensifikasi penggunaan sistem IT.

Sedangkan tantangan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, diantaranya adalah (1) Optimalisasi kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), (2) Harmonisasi tata ruang laut dan darat untuk penguatan penyelarasan antara RTRW dengan RZWP3K dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional/Tertentu (RZ KSN/KSNT), (3) Masih terjadinya praktek IUU *fishing* dan *destructive fishing*, dan (4) Sinergi stakeholders dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan. Dalam kondisi ini nelayan terkendala dengan pemenuhan persyaratan prosedural perbankan yang dianggap cukup rumit dan panjang.

Kondisi kesejahteraan pada nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang diperolehnya masih sangat terbatas. Permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi MEA 2015 utamanya adalah belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha UMK untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi lintas sektor termasuk dalam mengakses pembiayaan, perlindungan terhadap pasar domestik dan sertifikasi produk.

Dalam menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun ke depan 2026-2029, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari melakukan analisis dalam memetakan lingkungan strategis organisasi dengan teknik analisis kekuatan (*strength*) - kelemahan (*weakness*) - peluang (*opportunities*) - hambatan (*threats*) atau SWOT Analisis sebagai jembatan yang menghubungkan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang telah ditetapkan dengan strategi, kebijakan dan program pembangunan yang akan ditempuh maka perlu diawali dengan analisis lingkungan strategis yang senantiasa berkembang dinamis. Analisis dimaksud mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, dimana masing-masing analisis ditinjau dari tiga aspek utama, yakni sosial, ekonomi dan ekologi.

• **Faktor Internal**

a. Kekuatan (*Strength*)

Dengan memperhatikan *stakeholders* dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari memiliki kekuatan yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Lokasi PPS Kendari yang langsung menghadap Laut Banda adalah merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-714 dan 715) dengan beberapa keanekaragaman sumberdaya ikan dan mempunyai nilai ekonomis tinggi yang masih potensial untuk dikembangkan pengelolaannya.
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan master plan.
- 3) Tersedianya data statistik dan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan yang dapat mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara bertanggungjawab.

- 4) Tersedia dan telah operasionalnya prasarana pelayanan terpadu di kawasan PPS Kendari.
- 5) Pelayanan Publik berstandar ISO 9001 : 2008

b. Kelemahan

Disamping kekuatan yang dimiliki, analisis terhadap lingkungan internal juga memperhatikan unsur-unsur kelemahan yang harus dipertimbangkan antara lain :

- 1) Kemampuan manajemen maupun teknis SDM yang masih kurang memadai.
- 2) Penurunan kapasitas fasilitas pokok pelabuhan terutama pendangkalan kolam pelabuhan
- 3) Terbatasnya biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas prasarana pelabuhan.
- 4) Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran serta keterampilan nelayan dalam penanganan ikan hasil tangkapan

• Faktor Eksternal

a. Peluang

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dan pengembangan perikanan tangkap sesuai visi dan misi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah sebagai berikut:

- 1) Tumbuh dan berkembangnya iklim usaha sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong peningkatan investasi di wilayah Kota Kendari.
- 2) Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 3) Semakin meningkatnya pangsa pasar produk perikanan baik lokal maupun nasional, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengkonsumsi produk pangan yang bergizi dan menyehatkan.
- 4) Aksesibilitas distribusi hasil perikanan.

b. Ancaman/Tantangan

Adapun beberapa ancaman/tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya komitmen instansi terkait dalam penerapan regulasi perikanan.
- 2) Maraknya pembangunan industri diluar Kawasan sehingga mengancam eksistensi industri dalam kawasan.

- 3) Pendaratan ikan belum mampu memenuhi kapasitas pengolahan ikan yang ada dalam Kawasan.
- 4) Masih rendahnya kemampuan masyarakat menyerap informasi yang ada di Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan.
- 5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perikanan khususnya nelayan yang bisa dilihat dari rendahnya tingkat pendidikannya menyebabkan proses alih teknologi dan ketrampilan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga berdampak pada kemampuan pengembangan usaha.
- 6) Masih rendahnya mutu hasil perikanan yang menyebabkan nilai jual produk perikanan menjadi rendah.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal, maka dapat diketahui unsur-unsur kekuatan (strenght), kelemahan (weakness) peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Keempat unsur tersebut harus dapat dianalisa untuk menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2026 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan, dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja selama kurun waktu 1 tahun yaitu pada tahun 2026. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja (Lkj) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tahun 2026 sebagai berikut

1. Ikhtisar Eksekutif / *Executif Summary*

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggungjawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu

organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode tahun yang tertentu (tahun pelaporan).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah ditanda tangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan samudera Kendari dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Tahun 2026 - 2029	21
Tujuan dan Sasaran Kegiatan	25
Indikator Kinerja Tahun 2025	27
Rencana Aksi	30

.....	21
.....	25
.....	27
.....	30



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2026 - 2029

RPJMN Tahun 2026-2029 merupakan integrasi antara kebijakan RPJPN Tahun 2026-2045 dengan visi, misi, dan program Presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2026-2029. Pembangunan jangka panjang tahun 2026-20245 merupakan tahapan pembangunan yang berkesinambungan dimana tahun 2026-2029 merupakan tahap pertama penguatan transformasi. Untuk itu di dalam 2026-2029 diuraikan berbagai upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap pertama RPJPN Tahun 2026-2045 yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana dan Kesenambungan Pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2026-2029 merupakan penggabungan antara Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2026-2045 Tahap I. RPJMN tahun 2026-2029 menetapkan delapan Prioritas Nasional sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung Asta Cita. Prioritas Nasional tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan arah kebijakan dan pelaksanaan strategi Rencana Strategis KKP 2026-2029. KKP berkontribusi dalam pencapaian indikator sasaran kegiatan prioritas dalam RPJMN 2026-2029 yang dijabarkan sebagai berikut:

Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 Tahap I



1 Transformasi Sosial

- Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
- Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif



2 Transformasi Ekonomi

- Melanjutkan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan
- Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
- Penerapan ekonomi hijau, termasuk pelaksanaan transisi energi tahap pertama
- Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia
- Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa



3 Transformasi Tata Kelola

- Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi
- Penyempurnaan fondasi penataan regulasi
- Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi
- Peningkatan kualitas ASN berbasis merit
- Kebijakan pembangunan berbasis bukti
- Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
- Peningkatan pelayanan public berbasis teknologi informasi
- Penguatan kapasitas masyarakat sipil



4 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepimpinan Indonesia

- Pembaharuan substansi hukum
- Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila
- Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional
- Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai
- Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif
- Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan
- Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi
- Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri



5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat
- Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana
- Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup
- Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan
- Penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK



6 Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

- Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi
- Pembangunan *island grid* (dimulai di Sumatera) dan *national grid* (dimulai antara Sumatera-Jawa)
- Percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital
- Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan *micro grid*)



7 Kestinambungan Pembangunan

- Reformasi tata kelola fiskal
- Mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non-pemerintah

Gambar 2. Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2026-2045 Tahap I

Sejalan dengan RPJMN 2026-2029, arah kebijakan dan pembangunan kelautan dan perikanan didasari oleh perubahan *mindset* bahwa pembangunan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dengan melindungi laut dan sumber dayanya, mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem perairan sebagai rumah bagi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Terdapat empat aspek yang melandasi kerangka pikir pembangunan ekonomi biru, yaitu:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Main System Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang didorong untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional maka sektor kelautan dan perikanan harus menjadi *leading sector* yang harus mendapatkan sokongan oleh sektor lainnya dalam setiap konteks pembangunan nasional.

2. Ekologi Sebagai Panglima

Pembangunan kelautan dan perikanan memprioritaskan pada perlindungan laut untuk memberikan ruang hidup bagi sumber daya hayati yang ada di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber pangan serta memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Laut merupakan episentrum serapan karbon dunia yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia dan pencegahan perubahan iklim dan gas rumah kaca. Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki harus dioptimalkan secara berkelanjutan sehingga menjadi *champion* di pasar global.

3. Market Driven Oriented

Pembangunan kelautan dan perikanan harus dapat mudah beradaptasi terhadap tuntutan pasar domestik dan global sehingga daya saing kompetitif dan komparatif harus terus ditingkatkan.

4. Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, mengakses informasi secara akurat dan *real-time*, serta mendorong pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan antara lain: pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi, pemanfaatan teknologi satelit, serta teknologi lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pembangunan kelautan dan perikanan memperhatikan 4 prinsip pembangunan yaitu; 1) **Tematik**, mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah; 2) **Holistik**, mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan; 3) **Integratif**, sinergi dan integrasi antara program dan anggaran lintas sektor; dan 4) **Spasial**, pengembangan kawasan berbasis daya dukung secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan 3 aspek keberlanjutan yaitu; sosial, lingkungan, dan ekonomi.



Gambar 3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru

Maka, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2026-2029 adalah: 1) Memperluas Kawasan Konservasi Laut; 2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; 3) Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan; 4) Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih baik, pemerintah telah mengidentifikasi lima arah kebijakan pengarusutamaan yang bersifat inovatif dan adaptif. Kelima arah kebijakan ini saling terkait dan bertujuan untuk menciptakan sektor kelautan dan perikanan yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan serta menjadi landasan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2026 – 2029, tujuan dari Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2026 – 2029 meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Dalam mencapai tujuan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan beberapa sasaran strategis yang kemudian dilakukan penjenjangan hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam hal ini adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yaitu:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja:
 - a. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp Juta)
2. Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton).
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis/dan atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - b. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai);
 - c. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - d. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - e. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai).
4. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja:
 - a. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal);
 - b. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai).

5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (nilai);
 - b. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - c. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai);
 - d. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (indeks);
 - e. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - f. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - g. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai);
 - h. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai);
 - i. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks);

2.3 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026

Untuk mengukur realisasi dan rencana strategis, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari menetapkan indikator kinerja dan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai sehingga lebih terarah dan terkendali. Target ini dituangkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program yang telah disusun sebelumnya. Adapun indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Tahun 2026 Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PJ
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)	7,745.41	Tim Kerja Pelayanan Usaha
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton)	16.000	Tim Kerja Operasional
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87,50	Tim Kerja Operasional
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85	Tim Kerja Kesyahbandaran
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	81	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	33	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	3739	Tim Kerja Kesyahbandaran
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28	Tim Kerja Kesyahbandaran
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	75,5	Tim Kerja Dukungan Manajerial

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PJ
	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	86	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88,2	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	84,5	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	77	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	82	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	92,10	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	71,75	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	88,80	Tim Kerja Dukungan Manajerial

Dalam mencapai sasaran kegiatan tahun 2026 Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai wujud Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar **Rp56.591.349.000.** Pagu tersebut dilaksanakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2026

No	KEGIATAN	PAGU
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;	38.765.585.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.	17.825.764.000
TOTAL		56.591.349.000

2.4 RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU pada perspektif internal proses dan learning and growth sebagaimana pada Tabel berikut ini:

Tabel 4. Rencana Aksi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2026

RENCANA AKSI TAHUN 2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BENDARI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit RI	Rencana Pelaksanaan	Indikator Kinerja (IKU)	Target Kegiatan	Status Target Kegiatan	Tahun																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							Jan	Feb	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agust	Sept	Oktr	Nov	Des																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Kategori Kegiatan 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1	Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 1	Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1	1. Rencana Pelaksanaan 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1	1000000000	1000000000	1000000000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

RENCANA ARSI TAHUN 2020
PELABUHAN PERIKANAN LAMUDERA KENDAR

[illegible]

RENCANA ANGGARAN TAHUNAN 2020
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDAL

[illegible]

RENCANA AKSI TAHUN 2020
PELABIHAN PERIKANAN SANGKAT KENDARA

[illegible]RENCANA ARSITEK 2020
PELAKSIAN PERIKATAN LAMUDA KENDARA[illegible]

RENCANA AKSI TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Daftar Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub-RT	Kegiatan/Strategi	Alokasi Anggaran (Rp)	Tipe Kegiatan	Status/Tingkat Kegiatan	Tahun											
							Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto	Nov	Des
			1. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			2. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			3. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			4. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			5. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			6. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			7. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			8. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			9. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			10. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			11. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			12. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			13. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			14. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			15. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			16. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			17. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			18. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			19. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												
			20. Pemeliharaan Kapal Perikanan (KPP)	1.000.000.000	1	100%												

Rencana Aksi Tahun 2025
 Rencana Pelaksanaan Pembangunan
 Samudra/Kendari

 Kementerian Kelautan dan Perikanan
 Republik Indonesia

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi
Realisasi Anggaran

.....34

.....84



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap tahun 2026 diukur melalui 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terbagi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yakni sebagai berikut:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja sebanyak 1 indikator;
2. Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja sebanyak 1 indikator;
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab, dengan indikator kinerja sebanyak 5 indikator;
4. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja sebanyak 2 indikator;
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja sebanyak 8 indikator.

Pencapaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2026	TRIWULAN I		
					TARGET	REALISASI	%
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	01.	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp.Juta)	7.745,41	1.500	1.978,86	120
2.	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat	02.	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan	16.000	5.000	6.633,49	120

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2026	TRIWULAN I		
					TARGET	REALISASI	%
			Samudera Kendari (Ton)				
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab	04.	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87,5	87,5	93	106,29
		07.	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	33	33	67,03	120
4.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	08.	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	3739	3664	3833	104,61
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	11.	Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	86	86	100	116,28
		14.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	77	77	100	120
		18.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	88,80	88,80	95,50	107,55

Berdasarkan tabel di atas, nilai kinerja organisasi (NKO) PPS Kendari pada triwulan I adalah 114,20, dengan 5 (lima) IKU & IKM yang bernilai Istimewa (nilai di atas 110), dan 3 (Tiga) IKU & IKM yang bernilai Baik (nilai 90- <110). Pembahasan masing-masing indikator akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Permen KP Nomor 35/PERMEN-KP/2023 untuk laporan kinerja interim, sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan berjalan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan berjalan dengan triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya (jika ada);
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan triwulan berjalan dengan target tahunan;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.2. EVALUASI DAN ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

Adapun hasil evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Kegiatan 1 – Nilai PNPB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 1 (satu) Indikator yakni; Nilai PNPB non SDA Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)

Indikator Kinerja (IK-1) : Penerimaan PNPB non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indikator Nilai PNPB non SDA dari sektor Perikanan Tangkap adalah seluruh penerimaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari berasal dari penerimaan operasional Pelabuhan. Peningkatan PNPB dari sektor perikanan diantaranya ditentukan dari arah operasional pelabuhan perikanan samudera kendari. PNPB

yang dikelola oleh PPS Kendari berupa PNBP yang berasal dari Pendapatan jasa pelabuhan, Penggunaan sarana dan prasarana, Jasa lainnya.

Target nilai PNBP non SDA pada tahun 2026 adalah sebesar Rp7.745.410.000 dengan periode pengukuran triwulanan. Adapun realisasi target PNPB Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja "Penerimaan PNBP non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 1					Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Indikator Kinerja – 1					Penerimaan PNBP non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan I Tahun 2021 – 2024					Realisasi Tahun 2026				
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realiasi thd Target Tahun 2026
1.3	1.9	2.165,84	2.153,71	1.671,49	7.745,41	1.500	1.978,86	120	25,54

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2026

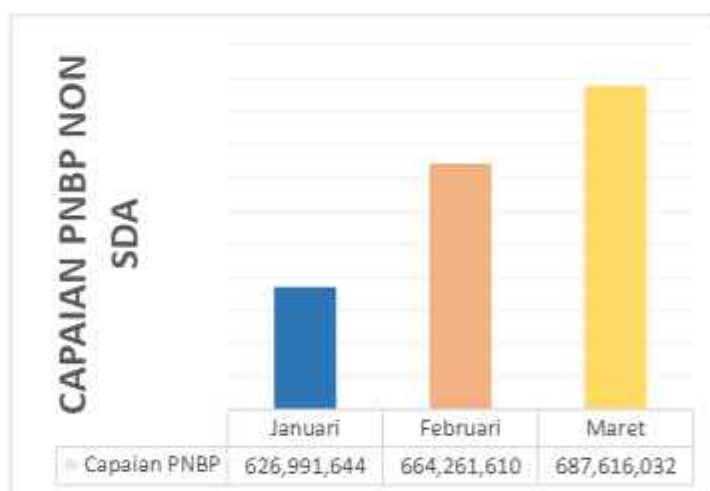
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target sebesar Rp1.978.869.286 atau 120% dari target. Adapun laporan target & realisasi PNBP per akun yang bersumber dari data TPNBP – SPAN – dan SIMPONI adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Laporan Target & Realisasi PNBP Per Akun Triwulan I Tahun 2026

No	Akun	Target Sumber Data TPNBP (Rp)	Realisasi – Sumber Data Simponi (Rp)	Realisasi – Sumber Data SPAN (Rp)
1.	425131 – Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	89.679.000	251.904.215	251.904.215
2.	425132 – Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	899.000	0	0
3.	425151 – Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.439.762.000	305.919.044	310.344.107

No	Akun	Target Sumber Data TPNBP (Rp)	Realisasi – Sumber Data Simponi (Rp)	Realisasi – Sumber Data SPAN (Rp)
4.	425621 – Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	5.215.076.000	1.413.493.792	1.413.493.792
5.	425911 – Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	0	3.127.172	3.127.172
TOTAL		7.745.416.000	1.974.444.223	1.978.869.286

Apabila dilihat dari jenis akun, capaian tertinggi berasal dari pendapatan jasa Pelabuhan perikanan yang terdiri dari jasa pengadaan air, pas masuk, tambat labuh, jasa PAL, bengkel, pemakaian Listrik, dan pelayanan kebersihan kawasan Pelabuhan. Dari ke-7 pendapatan jasa tersebut, pengadaan air merupakan penyumbang PNBPN terbesar dengan capaian sebesar Rp537.181.449, kemudian pelayanan pas masuk sebesar Rp295.484.200 dan tambat labuh sebesar Rp427.522.594. Apabila dilihat capaian PNBPN per bulannya, pada triwulan I tahun 2026, rata-rata capaian per bulan sebesar Rp659.623.095 dan telah memenuhi target realisasi per bulan tahun 2026.



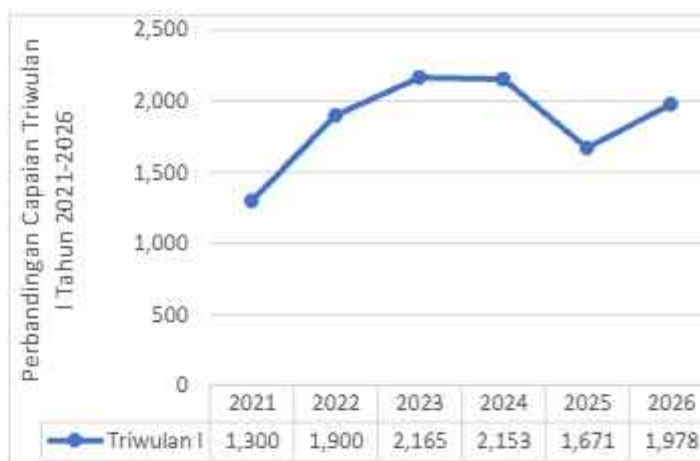
Grafik 1. Capaian PNBPN Non SDA Triwulan I

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan realisasi di triwulan I tahun 2025, realisasi di tahun ini terdapat peningkatan penerimaan sekitar Rp307.379.286 atau sebesar 15.53%. Semua penerimaan di tahun ini mengalami peningkatan penerimaan termasuk akun 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu. Adapun akun 425122 – Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan

Mesin sudah tidak ada penerimaan di tahun ini, namun tidak mengurangi jumlah realisasi PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

Grafik 2. Perbandingan Capaian IKU Penerimaan PNBPN Triwulan I Tahun 2021 - 2026



3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2026, capaian kinerja untuk IKU ini sudah mencapai 25,54%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Pencapaian IKU Penerimaan PNBPN non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp1.978.869.286 atau 120 % telah melampaui dari target sebesar Rp1.500.000.000. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen para petugas pengelola PNBPN baik yang bertugas di pelayanan seperti pas masuk dan tambat labuh maupun yang bertugas sebagai petugas pengadministrasi/penatausahaan PNBPN. Selain itu, terjadi peningkatan di beberapa sektor seperti meningkatnya kegiatan operasional pelabuhan, produksi ikan, penggunaan air, frekuensi kunjungan pengguna jasa ke dalam Pelabuhan, dan perubahan tarif sewa tanah dan bangunan yang cukup signifikan dari PP. 85 tahun 2021 ke PP. 28 tahun 2020 yang mana kenaikan tarif berkisar antara 10-100%.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian IKU antara lain rendahnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pembayaran PNBPN terutama jasa PNBPN bulanan maupun tahunan serta sering terjadinya error pada aplikasi/mesin pas masuk yang mana petugas tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pemeliharaan ringan karena penyedia aplikasi/mesin perlu keahlian khusus.

5) Analisa Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian PNBPN di antaranya pada awal tahun dilaksanakan monitoring dan evaluasi capaian PNBPN non SDA di tahun 2025

sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk selanjutnya dapat ditingkatkan lagi di tahun 2026.



Gambar 4. Kegiatan Penunjang Pencapaian PNBP Non SDA

3.2.2. Sasaran Kegiatan 2 – Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat

Pada Sasaran Kegiatan Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat terdapat 1 (satu) indikator yang mendukung yakni Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton).

Indikator Kinerja (IK-2) : Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Produksi Perikanan Tangkap merupakan hasil perhitungan dari volume produksi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari. Realisasi produksi perikanan tangkap diukur dan dilaporkan secara berkala setiap bulan. Adapun capaian IKU ini terlampir pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja "Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 2					Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat				
Indikator Kinerja – 2					Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan I Tahun 2021 – 2024					Realisasi Tahun 2026				
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realiasi thd Target Tahun 2026
6.500	5.884	7.887,29	6.465,81	3.210,93	16.000	5.000	6.633,49	120	41,45

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian IKU pada triwulan ini sebanyak 6.633,49 ton atau 120% dari target. Sumber produksi di PPS Kendari terdiri dari produksi dalam pelabuhan sebanyak 4.942,51 ton dan dari luar pelabuhan sebanyak 1.609,99 ton. Adapun rekap produksi bulanan tersaji pada



grafik di samping.

Grafik 3.
Rekapitulasi Jumlah
Produksi Triwulan I
PPS Kendari

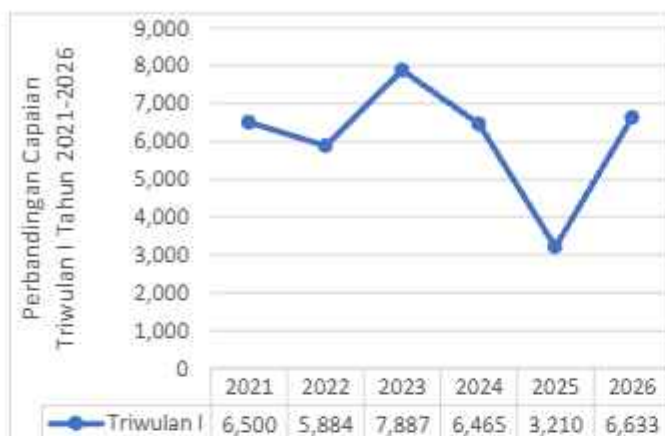
Apabila dihitung dalam rupiah, maka pendapatan produksi triwulan I dapat dilihat pada grafik di samping. Capaian tertinggi pada bulan Februari untuk ikan luar dan bulan Februari pada ikan dalam pelabuhan.



Grafik 4. Capaian Nilai Produksi Triwulan I PPS Kendari

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2025, volume produksi pada triwulan ini mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu sebesar 3.422,56 ton.



Peningkatan ini disebabkan oleh tingginya produktivitas hasil tangkapan ikan yang sejalan juga dengan peningkatan jumlah trip penangkapan ikan pada triwulan I tahun 2026 ini.

Grafik 5. Perbandingan Capaian Volume Produksi Triwulan I Tahun 2021-2026

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, capaian triwulan ini telah mencapai mencapai 41,45%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Pencapaian IKU Penerimaan Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 6.633,49 ton atau 120 % telah melampaui dari target sebanyak 5.000 ton. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha/pemilik kapal terhadap regulasi pembongkaran ikan dan kesiapan petugas pendata dalam melakukan pencatatan hasil produksi tangkapan terhadap kapal yang melakukan pembongkaran ikan.

Sedangkan untuk penghambat pencapaian IKU ini antara lain faktor cuaca buruk, kerusakan mesin, serta adanya pengurangan petugas enumerator yang ada di PPS Kendari.

5) Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari di antaranya aktivitas bongkar yang rutin di dermaga, monitoring mutu ikan menjelang bulan puasa, dan tren ikan dominan yang ada di PPS Kendari.



Gambar 5. Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap

3.2.3. Sasaran Kegiatan 3 – Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Pada Sasaran Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab terdapat 5 (lima) indikator yang mendukung yakni 1) Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, 2) Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, 3) Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, 4) Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dan 5) Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

Indikator Kinerja (IK-3) : Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Sesuai dengan fungsi pengusahaan tersebut berupa penyediaan dan/atau jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Berdasarkan PP 85 Tahun 2021, jenis PNBK yang berlaku di KKP di antaranya meliputi penerimaan dari pelabuhan perikanan melalui sewa lahan/ gedung/ bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisa dan atau evaluasi permohonan pengusahaan.

Target IKU yang ditetapkan pada tahun 2026 sebesar 100% dengan periode pengukuran tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan pada triwulan ini. Namun, adapun capaian bulanan dokumen yang dianalisisasi dan dievaluasi pengusahaan baru, perpanjangan, serta addendum dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Bulanan Indikator Kinerja "Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2026

Bulan	Nama Pengguna/Badan Usaha Perorangan/Instansi	Keterangan
Januari	Tidak ada permohonan	
Februari	Tidak ada permohonan	
Maret	1. La Taosi (Penyedia Kayu)	Permohonan Baru

Bulan	Nama Pengguna/Badan Usaha Perorangan/Instansi	Keterangan
	2. Suwardi (Gudang Sarana Perikanan)	Permohonan Baru
	3. Tanpa Nama (Rumah Makan)	Permohonan Baru

Selain itu, PPS Kendari juga menyelenggarakan sosialisasi rangka memfasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan legalitas usaha sekaligus mendukung tertib administrasi bagi para pelaku usaha di lingkungan PPS Kendari. Para pengusaha perorangan yang menyewa lahan dan bangunan di PPS Kendari difasilitasi untuk melengkapi keterangan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada NIB masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian tarif sewa lahan dan bangunan sesuai ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara legal, tertib, dan berkelanjutan, serta mendapatkan kepastian dan kemudahan dalam pengelolaan usaha ke depannya.

Gambar 6. Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU Permohonan Pengusahaan



Indikator Kinerja (IK-4) : Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Dalam upaya menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DJPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja pelabuhan perikanan. Adapun ruang lingkup kegiatannya

meliputi 1). Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter), 2) Fasilitas Pelabuhan Perikanan (6 parameter), 3) Pelayanan Umum (9 parameter), 4) Investasi dan Industri (3 parameter).

Berikut parameter yang tertuang pada aplikasi PIPP yaitu: (1) Frekuensi pengiriman data (PIPP), (2) E-Logbook, (3) Aplikasi SPB Online, (4) SHTI, 5. Realisasi penyerapan anggaran, 6. Pendapatan pelabuhan, 7. Ketersediaan SDM Pengelolah PP, (8). Kapasitas Daya Tampung kolam pelabuhan, (9) Panjang Dermaga (10) Kedalaman Kolam (11) Sarana Pelabuhan (Docking, Bengkel) (12) Kelengkapan Fasilitas pemasaran dan distribusi ikan (13) Ketersediaan lahan pelabuhan (14) Pelayanan Tambat Labuh (15) Produksi perikanan (16) Frekwensi kunjungan Kapal (17) STBLKK (18) Sosialisasi dan BIMTEK (19) Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian SDI, Perkarantinaan ikan, Publikasi (20) Pelaksanaan K5 (21) Penyaluran air bersih (Kapal dan Industri pengolahan) (22) Penyaluran Es (Kapal) (23) Penyaluran BBM (Kapal) (24) Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP (25) Pemanfaatan Lahan Pelabuhan (26) Penyerapan Naker (27) Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan. Adapun capaian IKU ini terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 3					Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawa				
Indikator Kinerja – 4					Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan I Tahun 2021 – 2025					Realisasi Tahun 2026				
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realiasi thd Target Tahun 2026
92,75	90,95	92,42	92,75	93,25	87,5	87,5	93	106,3	106,3

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 93 atau 106,3% dari target. Adapun rekapitulasi evaluasi kinerja aplikasi PIPP di PPS Kendari tersaji pada grafik di samping. Pada triwulan I, nilai indikator kinerja

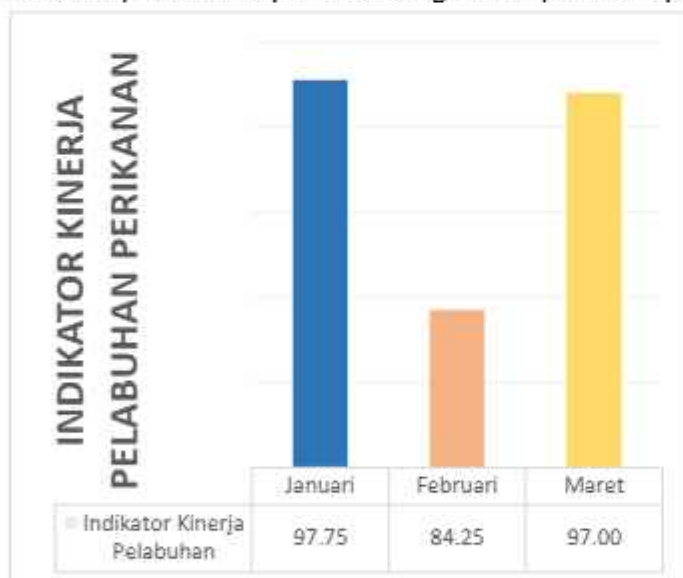


pelabuhan PPS Kendari terjadi penurunan pada bulan februari karena beberapa parameter tidak terisi disebabkan miskomunikasi antar tim kerja.

Grafik 6. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Triwulan I Tahun 2026

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2025, IKU ini mengalami penurunan sebesar 0,25. Walaupun tidak signifikan, namun perlu dilaksanakan evaluasi terkait



capaian bulanan yang sangat menurun pada bulan februari. Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian pada 5 tahun terakhir, capaian pada triwulan ini merupakan capaian tertinggi kedua dengan nilai yaitu 93.

Grafik 7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Triwulan I Tahun 2021-2026

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, IKU ini telah mencapai target sebesar 106,3%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Pencapaian IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 93 atau 106,3%. Tercapainya target ini tidak terlepas kerja sama dan koordinasi antartim kerja lingkup PPS Kendari dengan memproporsikan anggaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

5) Analisa Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari seperti kegiatan Evaluasi Data PIPP dalam rangka mendukung kebijakan PIT yang akan dilaksanakan pada semester I nantinya.

Indikator Kinerja (IK-5) : Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%), jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%), dan jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%). Dalam manual IKU, formula perhitungan dari ketiga pelayanan ini dibobot lalu dijumlahkan. Target dari IKU ini sebesar 85% dengan perhitungan tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan pada triwulan ini. Namun, adapun capaian bulanan SPB, STBLKK, jumlah kapal berpangkalan, SHTI, dan Revisi/Penolakan SHTI dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Bulanan Indikator Kinerja "Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2026

Bulan	UKURAN				
	Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	STBL Kedatangan Kapal	Kapal Berpangkalan	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan	Revisi/ Penolakan SHTI
Januari	561	502	561	0	0
Februari	547	562	547	157	0
Maret	401	413	401	671	0
TOTAL	1509	1477	1509	828	0

Pada triwulan I ini juga beberapa kegiatan penunjang yang telah dilakukan seperti melakukan penandaan *life jacket* dan *life buoy* terhadap kapal perikanan

yang beroperasi di wilayah pelabuhan, berperan aktif di ruang kepatuhan guna melaksanakan pengawasan serta pemenuhan kepatuhan terhadap pengisian dan pengiriman data e-logbook secara tepat waktu dan akurat, serta memberikan edukasi terkait persyaratan pembuatan persetujuan berlayar dan rekapitulasi aktivitas kapal melalui media sosial.



Gambar 7. Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU Tingkat Kesyahbandaran

Tidak hanya itu, PPS Kendari juga memberikan dukungan melalui tim kerja kesyahbandaran dalam kegiatan pengawasan ketertiban pengantrian pengisian BBM subsidi. Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung kelancaran pelaksanaan operasional



Pengelola SPBU-N Utama Sulawesi Tenggara. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan proses distribusi BBM subsidi berjalan tertib, aman, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus menjaga kenyamanan dan ketertiban para pengguna jasa, serta memastikan pelayanan tetap optimal. Sinergi ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendukung pelayanan publik yang tertib dan bertanggung jawab di lingkungan pelabuhan.

Gambar 8. Kegiatan Sosialisasi Pengantrian Pengambilan Subsidi BBM

Indikator Kinerja (IK-6) : Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Pelabuhan Perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Target IKU tahun 2026 ini sebesar 81% dengan perhitungan tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan pada triwulan ini. Namun, adapun capaian yang dapat dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2026

No	Uraian Pekerjaan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Pemeliharaan jaringan listrik dan lampu	65.000.000	15.809.000	49.191.000
2.	Pemeliharaan tanah jalur instalasi pipa air bersih	50.000.000	2.550.000	47.450.000
3.	Pemeliharaan cctv	50.000.000	3.108.000	46.892.000

Selain itu, berdasarkan hasil monitoring evaluasi ditemukan banyak lubang pada jalan utama kawasan PPS kendari menuju TPI higienis yang merupakan akses utama yang digunakan untuk mobilisasi keluar masuk kawasan seperti pengangkutan ikan, es, maupun kebutuhan perbekalan kapal. Berdasarkan hal tersebut dilaksanakan perhitungan dan analisa teknis untuk biaya pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan senilai Rp. 46.880.000 (empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Identifikasi lainnya terdapat pada jaringan listrik kawasan yang mana sebagian besar instalasi jaringan listrik membutuhkan pemeliharaan dimana panel sudah banyak yang karatan serta kabel-kabel yang sudah mulai lapuk termakan usia dan

puncaknya pada bulan Maret terjadi gangguan pada jaringan listrik PPS Kendari yang disebabkan oleh fuse kubikel PPS Kendari yang mengindikasikan bahwa ada kerusakan jaringan kabel bawah tanah dari kubikel menuju panel listrik utama seperti pada gambar di samping

Gambar 9. Kerusakan jaringan kabel bawah tanah dari kubikel menuju panel listrik utama



Ket : Gambar kiri tanda panah merah menunjukkan indikator fuse kubikel putus
Gambar kanan kondisi fuse putus setelah dikeluarkan dari kubikel

Setelah dilaksanakan pergantian fuse dan arus listrik dari sumber PLN, ledakan kembali terjadi pada kubikel milik PLN dan kabel jaringan PLN yang putus sebagaimana gambar di samping

Gambar 10. Ledakan kabel jaringan listrik PLN



Berdasarkan kondisi di atas, pihak PPS berkoordinasi dengan PLN untuk perbaikan kubikel dan penyambungan arus listrik ke jaringan kubikel di PPS Kendari. Tidak hanya melakukan pemeliharaan listrik, tim kerja tata kelola sarana dan prasarana juga melakukan beberapa pemeliharaan rutin seperti pemeliharaan meteran air dan pemeliharaan pompa pump it pada instalasi pengolahan air bersih.

Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh tim kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana pada triwulan I ini yaitu melaksanakan inspeksi kepatuhan tenan terhadap PT. Sultra Tuna Samudera, PT. Kendari by Seafood, dan PT. ANI. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha yang dijalankan oleh para tenan telah sesuai dengan ketentuan peraturan, standar operasional, serta persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku di kawasan pelabuhan.

Gambar 11. Inspeksi Kepatuhan Tenan Kawasan PPS



Adapun beberapa kegiatan lainnya yang menjadi penunjang dalam hal pengembangan fasilitas yaitu progres dari salah satu program prioritas nasional di bawah KKP yakni Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Di awal tahun 2026, Dirjen Perikanan Tangkap melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sorue Jaya, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kunjungan ini merupakan monitoring pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Peninjauan secara langsung kondisi dan aktivitas di Kampung Nelayan Merah Putih, dimana Dirjen Perikanan Tangkap didampingi oleh Kapolda Sulawesi Tenggara, Kepala PPS Kendari, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Plt.Kepala BPPMHKP Kendari, Camat Soropia, Ketua Koperasi Merah Putih, serta para nelayan.



Gambar 12. Kunjungan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Gubernur Sulawesi Tenggara, serta Bupati Konawe ke Lokasi KNMP Sorue Jaya

Setelah kunjungan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, kunjungan ke KNMP juga dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara didampingi oleh Bupati

Konawe, Danlanal, Kepala PPS Kendari, serta pemerintah daerah setempat bersama para pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan pemantauan langsung terhadap progres pembangunan KNMP. Pada kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya memastikan kesiapan sektor pendukung operasional kawasan pelabuhan dan permukiman nelayan, seperti ketersediaan air bersih, pasokan listrik, infrastruktur jalan yang memadai, serta penghijauan lahan. Hal ini dinilai krusial agar keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat nyata serta berkelanjutan bagi masyarakat nelayan dan lingkungan sekitarnya.

Tidak hanya mendapatkan berbagai kunjungan dari pejabat setempat, Desa Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe juga menjadi salah satu calon



lokasi yang akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Karena itu dilakukan rapat koordinasi yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe dan dihadiri oleh Kepala PPS Kendari, kepala dinas terkait tingkat provinsi dan daerah, Danlanal, Kapolsek, Camat Soropia, Kepala Desa Sorue Jaya, serta para pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pembangunan KNMP.

Gambar 13. Rapat Koordinasi Persiapan Peresmian KNMP Sorue Jaya

Tidak hanya di Desa Sorue Jaya, pembangunan KNMP juga dilakukan di Desa Ghone Bhalano, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 20 Januari, Perwakilan PPS Kendari bersama Bupati Muna serta Stekholder terkait menghadiri kegiatan Mutual Check 0% (MC-0) serta Peletakan Batu Pertama pada paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

Gambar 14. Kegiatan MC-0 dan Peletakan Batu Pertama KNMP Kabupaten Muna



Indikator Kinerja (IK-7) : Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus: 1) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan, 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.

Menindaklanjuti hal tersebut, KKP telah memiliki suatu sistem informasi web yang disebut dengan SELARASKAN. Melalui aplikasi ini, tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan dapat dimonitoring mulai dari program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang dimutakhirkan secara berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor pelabuhan. Adapun formula perhitungan dari aplikasi SELARASKAN ini adalah

Skor keseluruhan = Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%).

Skor indikator program adalah program *mandatory* yang wajib dimutakhirkan dan *voluntary* (Program tidak wajib berjalan di pelabuhan perikanan) serta indikator hasil terdiri dari kebersihan pelabuhan, pengelolaan sampah, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3, dan kepatuhan regulasi.

Kategori yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) terdiri dari:

1. Kurang : 0 – 30
2. Cukup : >30 – 60
3. Baik: >61 – 80
4. Sangat Baik: >81 – 100

Target IKU tahun 2026 ini sebesar 33 dengan periode pengukuran triwulanan. Capaian IKU ini terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 3					Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab				
Indikator Kinerja – 7					Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan I Tahun 2021 – 2025					Realisasi Tahun 2026				
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realiasi thd Target Tahun 2026
N/A	N/A	N/A	34,87	86,83	33	33	67.03	120	120

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 67.03 atau 120% dari target. Adapun capaian implementasi SELARASKAN bulan Januari hingga Maret 2026 yang telah dikoreksi *evidence* oleh tim evaluasi SELARASKAN tersaji pada grafik di samping.

Grafik 8. Capaian Bulanan Nilai Pengendalian Lingkungan



2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2025, capaian di tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh



beberapa bukti dukung yang ditolak serta dokumentasi kegiatan yang berkurang karena waktu libur yang cukup panjang akibat libur lebaran Idulfitri 1446 H.

Grafik 9. Perbandingan Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, IKU ini telah mencapai target sebesar 120%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Capaian IKU di triwulan ini yang melebihi target dipengaruhi oleh kedisiplinan petugas untuk melakukan pencatatan dan penginputan ke dalam aplikasi SELARASKAN.

5) Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja nilai pengendalian lingkungan diantaranya adalah penimbangan sampah kapal perikanan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap NOMOR B.1697/DJPT/HK.410/XII/2025 TENTANG Pencegahan Pencemaran di Laut Akibat Limbah dan Sampah dari Aktivitas Kapal Perikanan. Tim Kerja Syahbandaran menyediakan tempat penampungan limbah dan sampah di atas kapal perikanan selama pelayaran dan aktivitas penangkapan ikan atau pengangkutan ikan serta melakukan pengelolaan limbah dan sampah di atas kapal perikanan dengan cara memilah, membawa limbah dan sampah di atas kapal perikanan, dan membuangnya ke tempat pembuangan limbah dan sampah.

Gambar 15. Penimbangan Sampah Kapal Perikanan di PPS Kendari



Kegiatan rutin lainnya terkait aktivitas kebersihan kawasan pelabuhan dengan menghitung muatan sampah organik dan anorganik, kerja bakti di lingkungan Pelabuhan, pemantauan keamanan di dermaga dan kawasan pelabuhan, serta berkolaborasi dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kendari melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan di kawasan PPS Kendari.



Gambar 16. Kegiatan Penunjang Lainnya Pencapaian Nilai Pengendalian Lingkungan

3.2.4. Sasaran Kegiatan 4 – Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Pada Sasaran Kegiatan Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari terdapat 2 (dua) indikator yang mendukung yaitu (1) Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan dan (2) Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Indikator Kinerja (IK-8) : Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

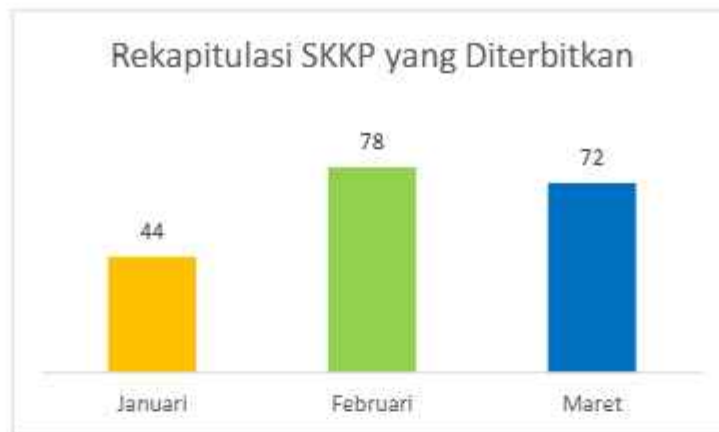
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Target IKU di tahun 2026 adalah sebanyak 3739 kapal dengan periode pengukuran triwulanan. Adapun capaian pada IKU ini terlampir pada tabel berikut:

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 4					Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Indikator Kinerja – 8					Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan				
Realisasi Triwulan I Tahun 2020 – 2024					Realisasi Tahun 2026				
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realiasi thd Target Tahun 2026
N/A	N/A	N/A	1408	2549	3739	3664	3833	104,61	102,54

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 3833 kapal atau 104,61% dari target. Pada tahun 2025 yang lalu, capaian dokumen kapal yang diterbitkan sebanyak 3639 dan sesuai dengan manual IKU tahun 2026, capaian ini dapat ditambahkan dengan capaian yang ada pada triwulan I. Adapun rincian sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) yang diterbitkan setiap bulan tersaji pada grafik di bawah ini:



Grafik 10. Rekapitulasi Capaian Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) Triwulan I

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025, pada tahun ini meningkat karena formula perhitungan dari IKU ini juga dengan menambahkan capaian dari setiap tahun serta triwulannya. Hal ini sejalan dengan percepatan pelaksanaan Pembaruan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) berdasarkan Surat Edaran Nomor. B. 1416/MEN-KP/VIII/2023 tentang Pembaruan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP). Namun, apabila yang dibandingkan hanya capaian yang ada di triwulan 2026 saja (tanpa ada penambahan dari total capaian triwulan



sebelumnya) yaitu 169 kapal, maka capaian di ini mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025 yaitu sebanyak 256 kapal atau 24,22%.

Grafik 11. Perbandingan Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah Triwulan I

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, IKU ini telah mencapai target sebesar 104,61%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Adapun analisa dari faktor-faktor yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini antara lain meningkatnya kepatuhan dan kesadaran pelaku

usaha/pemilik kapal terhadap regulasi dan ketentuan perizinan serta koordinasi internal dan eksternal yang efektif antara petugas dengan stakeholder terkait.

5) Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang IKU ini yaitu mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), serta penyiapan kelembagaan Satuan Tugas Pengawasan SDKP Berbasis Masyarakat di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, partisipatif, dan bertanggung jawab



Gambar 17. Kegiatan Penunjang Pencapaian Kapal Perikanan Izin Daerah

Indikator Kinerja (IK-9) : Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024. Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan. Tingkat pemenuhan dibagi ke dalam 4 kategori sebagai berikut:

1. Nilai $\leq 0,25$ = Kategori "Kurang",
2. Nilai $> 0,25$ s.d $< 0,50$ = Kategori "Cukup",
3. Nilai $> 0,50$ s.d $< 0,75$ = Kategori "Baik",
4. Nilai $> 0,75$ s.d $1,00$ = Kategori "Sangat Baik".

Untuk mendapatkan nilai IKU ini diformulasikan dengan perhitungan jumlah SPB terbit dikalikan dengan koefisien kondisi pemenuhan persyaratan bekerja dibagi dengan jumlah SPB terbit sesuai dengan range GT kapal. Total nilai adalah jumlah masing-masing kepatuhan di setiap range GT kapal dibagi dengan jumlah kategori range GT kapal yang terdapat di pelabuhan.

Target IKU di tahun 2026 adalah sebesar 0,28 dengan periode pengukuran semester sehingga belum dilakukan perhitungan pada triwulan ini.

3.2.5. Sasaran Kegiatan 5 – Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Pada Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari terdapat 9 (sembilan) indikator yang mendukung yaitu: (1) Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai), (2) Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen), (3) Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai), (4) Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks), (5) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen), (6) Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen), (7) Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai), (8) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, (9) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

Indikator Kinerja (IK-10) : Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan, pengawasan, dan pengakuan akuntabilitas kerja. Secara teknis unit kerja tersebut harus memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 dan

mencapai nilai 45,10 bagi satuan kerja yang belum atau akan dicanangkan menuju WBK.

Nilai kinerja reformasi birokrasi KKP diperoleh dari indeks reformasi birokrasi hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap komponen proses yang mencakup 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil yang mencakup 3 (tiga) komponen. Komponen tersebut adalah:

1. Manajemen perubahan;
2. Penataan tata laksana;
3. Penataan manajemen SDM aparatur;
4. Penguatan akuntabilitas;
5. Penguatan pengawasan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Target nilai capaian pembangunan zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah 75,5 dengan periode pengukurannya adalah tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan pada triwulan ini. Namun, kegiatan penunjang pencapaian Nilai PM WBK ini beberapa telah dilaksanakan antara lain monitoring dan evaluasi pemenuhan dokumen ZI-WBK di tahun 2025. Selain itu, penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.



Gambar 18. Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2026

Pada bulan Februari, Kepala Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari juga memberikan penghargaan kepada ASN Terbaik, Non ASN Terbaik serta Agen Perubahan PPS Kendari sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan dedikasi pegawai. Penghargaan ini diberikan kepada pegawai yang telah menunjukkan kinerja terbaik, komitmen tinggi, dan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan pelabuhan. Diharapkan, penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus bekerja dengan profesional, berintegritas, dan menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat.



Gambar 19. Pemberian Penghargaan kepada ASN dan NON ASN Terbaik Triwulan II Tahun 2025 dan Penunjukan Agen Perubahan PPS Kendari Tahun 2026

Menjelang hari raya IdulFitri 1447 H, PPS Kendari juga mengimbau untuk menjaga integritas dengan tidak memberi maupun menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan



kewajiban tugas. Gratifikasi dapat berupa uang atau setara uang, bingkisan/parcel, fasilitas, maupun bentuk pemberian lainnya. Permintaan dana, sumbangan, atau hadiah yang berkaitan dengan jabatan juga tidak diperkenankan, karena dapat berimplikasi pada pelanggaran hukum.

Gambar 20. Imbauan Stop Gratifikasi

Indikator Kinerja (IK-11) : Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Merupakan indikator yang menilai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP audit, reviu, dan evaluasi baik untuk bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Target IKU ini adalah 86 dengan periode pengukurannya adalah triwulanan. Capaian IKU ini terlampir pada tabel di bawah berikut:

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja "Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Indikator Kinerja – 11					Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan I Tahun 2021 – 2025					Realisasi Tahun 2026				
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realiasi thd Target Tahun 2026
N/A	N/A	N/A	100	100	86	86	100	116,28	116,28

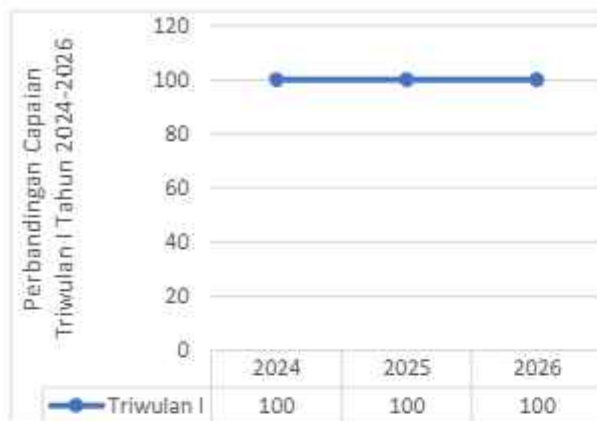
1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target adalah sebesar 100% atau 120% dari target tahunan. Seluruh hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti di aplikasi SIDAK pada triwulan I Tahun 2026.



Grafik 12. Grafik Capaian Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan Triwulan I

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya



Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya, capaian tahun ini sama yaitu bernilai 100% yang artinya tidak terjadi penurunan capaian dan perlu dipertahankan pada triwulan selanjutnya.

Grafik 13. Perbandingan Capaian Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan Triwulan I

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, IKU ini telah mencapai target sebesar 116,28%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Capaian pada IKU ini melebihi target di triwulan I tahun 2026 disebabkan oleh terpenuhinya LHP audit, reviu, dan evaluasi yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) pada aplikasi SIDAK.

5) Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan yang rutin dilaksanakan. Pada triwulan ini, PPS Kendari menerima kunjungan monitoring dan pendampingan dari Tim Setjen KKP dalam rangka tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Kegiatan ini meliputi peninjauan sarana dan prasarana layanan informasi publik/PPID, pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP dan DIK), pemenuhan standar layanan, pengelolaan website dan aplikasi E-PPID, serta identifikasi kendala yang dihadapi. Melalui kegiatan ini, PPS Kendari terus berkomitmen memperkuat transparansi dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara profesional dan akuntabel.



Gambar 21. Kegiatan Penunjang Pencapaian Presentase Hasil Pengawasan Triwulan I

Indikator Kinerja (IK-12) : Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indikator penilaian mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dihitung berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian dalam evaluasi atas implementasi SAKIP yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja

(30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Adapun kategori dan predikat penilaian mandiri SAKIP sebagai berikut:

Tabel 16. Kategori Penilaian Mandiri SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Target Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah 88,2 dengan periode pengukuran adalah tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan pada triwulan ini. Namun, adapun capaian kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada tanggal 14 Januari 2026 sebagaimana terlampir.



RINCIAN INDIKATOR KINERJA											
Kategori		Indikator		Sub Indikator		Tipe		Sifat		Status	
Kategori		Indikator		Sub Indikator		Tipe		Sifat		Status	

- a. Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 terdapat beberapa penyesuaian pada pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu:
1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 dimensi meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.
 2. Indikator dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu);/ D-IV (Diploma Empat);
 - d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
 - e. Pendidikan D-II (Diploma Dua) /D-I (Diploma Satu) /Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat, dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA
 3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 pada tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga pengukuran bobot dimensi kualifikasi berubah menjadi:
 - a. ASN yang memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi/ di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki akan diberikan bobot nilai 25;
 - b. ASN yang memperoleh ijazah pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki akan diberikan bobot nilai 20;
 - c. ASN yang memperoleh ijazah pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki akan diberikan bobot nilai 10;
- Bobot dimensi kualifikasi pendidikan tersaji sebagai berikut:

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S1	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Gambar 25. Perhitungan Dimensi Kualifikasi Pendidikan IP ASN

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 pada tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan terdiri:

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya;
- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
 - Diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial);
 - Diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional);
 - Diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana); dan
 - Pengembangan kompetensi 20 JP dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Misconduct	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

Gambar 26. Perhitungan Dimensi Kompetensi IP ASN

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

Gambar 27. Perhitungan Dimensi Kinerja IP ASN

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang;
 - Hukuman disiplin berat

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Gambar 28. Perhitungan Dimensi Disiplin IP ASN

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat terakhir atau SK pencantuman gelar yang sudah diperbaharui dengan pemutakhiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
 - Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemutakhiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator SIASN BKN;
 - Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat kinerja pada SIASN BKN; dan

- d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari:
 - a. Kualifikasi memiliki bobot 25%;
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40%;
 - c. Kinerja memiliki bobot 30%;
 - d. Disiplin memiliki bobot 5%
9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi IP ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP\ ASN = Nilai\ Kualifikasi + Nilai\ Kompetensi + Nilai\ Kinerja + Nilai\ Disiplin$$

$$IP\ ASN\ Unit\ Organisasi = \frac{Total\ Nilai\ IP\ ASN\ seluruh\ pegawai\ ASN\ unit\ Organisasi}{Jumlah\ Pegawai\ ASN\ unit\ Organisasi}$$

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Gambar 29. Kategori Penilaian Tingkat IP ASN

11. Penilaian IP ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN yang terdiri dari:
 - a. PNS, dan
 - b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian IP ASN.
12. Penilaian IP ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:
 - a. CPNS;
 - b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
 - c. Dipekerjakan (DPK);
 - d. Tugas Belajar Dibiayai.

Berdasarkan perjanjian kinerja, target IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah sebesar 86 dengan pelaporan semester sehingga belum dilakukan perhitungan pada triwulan ini. Namun, arahan terkait IP ASN telah disebarkan melalui *Whatsapp Group* PPS Kendari dan imbauan untuk mengikuti diklat/seminar pada e-Milea sebagaimana terlampir:



Gambar 30. Pemberitahuan terkait IP ASN melalui *Whatsapp Group* PPS Kendari

Selain itu, PPS Kendari juga rutin melaksanakan pembinaan pegawai yang dipimpin langsung oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, seluruh ketua tim kerja, dan seluruh pegawai PPS Kendari. Dalam kegiatan ini juga diimbau terkait kedisiplinan pegawai, evaluasi kinerja, serta penguatan kebersamaan antar pegawai.



Gambar 31. Pembinaan Pegawai PPS Kendari Tahun 2026

Indikator Kinerja (IK-14) : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrument penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan

secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Renacn Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Presentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat 1. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase SIRUP: } \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Target Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang dimumkan pada SIRUP di Samudera Kendari adalah 77 dengan periode pengukuran adalah triwulan. Capaian IKU ini terlampir pada tabel di bawah berikut:

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja "Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Indikator Kinerja – 14					Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang dimumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan I Tahun 2021 – 2025					Realisasi Tahun 2026				
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realiasi thd Target Tahun 2026
N/A	N/A	N/A	N/A	100	77	77	100	120	120

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target adalah sebesar 100% atau 120% dari target tahunan. Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari telah melakukan revisi RUP ada aplikasi SiRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi

yang telah disusun. Adapun hasil perhitungan capaian indikator ini tersaji pada tabel berikut:

Tabel 18. Hasil Perhitungan Capaian “Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Triwulan I Tahun 2026

Paket RUP Terumumkan	Statistik Moner Pagu Pengadaan	Selisih (Paket RUP – Statistik Moner)	% RUP Terumumkan	Keterangan
Total	Total			
43.633.886.000	43.633.886.000	0	100,00%	Sudah Sesuai

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan di tahun sebelumnya, capaian yang didapatkan sama yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian ini dapat dipertahankan dengan baik.

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, IKU ini telah mencapai target sebesar 120%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Capaian pada IKU ini melebihi target di triwulan I tahun 2026 disebabkan oleh terinputnya seluruh paket pengadaan barang/jasa di aplikasi SiRUP.

5) Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian IKU ini antara lain penginputan paket pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan pencatatan hasil pengadaan barang/jasa pada aplikasi AMEL.

Indikator Kinerja (IK-15) : Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan,

Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Barang Milik Negara semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya. Indikator ini merupakan indikator yang menggambarkan persentase pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku. Persentase pengelolaan BMN ini diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- a. Tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN) (12,5%)
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (25%)
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%)
- d. Penggunaan BMN hasil pengadaan barang modal yang didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian (bobot 25%)
- e. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%)

Target presentase pengelolaan BMN kerja Perikanan Samudera Kendari adalah 82 dengan periode pengukuran tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan pada triwulan ini.

Indikator Kinerja (IK-16) : Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Pencapaian indikator ini yakni nilai kinerja anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun aspek yang dinilai adalah aspek implementasi yang terdiri atas 12 (dua belas) komponen yakni (1) Revisi DIPA (2) Halaman IV DIPA (3) Pengelolaan UP (4) Rekon LPJ Bendahara (5) Data Kontrak (6) Penyelesaian Tagihan (7) Penyerapan Anggaran (8) Retur SP2D (9) Perencanaan Kas (10) Pengembalian SPM (11) Dispensasi Penyampaian SPM, dan (12) Pagi Minus. Adapun pengelompokkan hasil penilaian adalah sebagai berikut :

- a. Revisi DIPA, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker. Data revisi DIPA yang digunakan adalah untuk data revisi yang bersifat pergeseran (dalam hal pagu tetap), dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Target Revisi DIPA}}{\sum \text{Revisi DIPA}} \right)$$

- b. Halaman IV DIPA, Dihitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan rencana penarikan dana (% gap realisasi terhadap rencana). Angka gap per bulan yang diambil bernilai absolut sehingga dalam perhitungan rata-rata gap tidak saling meniadakan, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Rata - rata} \left\| \left(\frac{(\text{Realisasi Penarikan Dana}) - (\text{Perencanaan Hal III DIPA})}{(\text{Perencanaan Hal II DIPA})} \right) \right\|$$

- c. Pengelolaan UP, Dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu dibagi seluruh record GUP yang terdapat dalam set data, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{SPM GUP}} \right) \times 100$$

- d. Rekon LPJ Bendahara, Dihitung berdasarkan rasio LPJ Bendahara yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh LPJ Bendahara yang di sampaikan ke KPPN, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Data LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

- e. Data Kontrak, dihitung berdasarkan rasio data kontrak yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Data kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{data kontrak yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

- f. Penyelesaian Tagihan, Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai (yang tepat waktu dan terlambat) yang terdapat dalam set data, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total Tagihan}} \right) \times 100$$

- g. Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap pagunya. Target penyerapan anggaran K/L untuk I sebesar 15%, II

$$\left(\frac{\sum \text{Realisasi Anggaran}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$$

40%, III sebesar 60% dan sebesar 90%. K/L dengan tingkat realisasi diatas target per triwulan ke atas di berikan nilai maksimal, dengan rumusan sebagai berikut:

- h. Retur SP2D, dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan Jumlah SP2D yang terbit, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Retur SP2D}}{\sum \text{SP2D}} \right) \times 100$$

- i. Perencanaan Kas, dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu disampaikan sesuai nilai rencana penarikan dan kategori KPPN terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{data Renkas yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Renkas yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

- j. Pengembalian SPM, dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan Kementerian/Lembaga (Jumlah SPM yang diterbitkan KL termasuk Jumlah SPM yang salah/ditolak). Dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{SPM salah}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

- k. Dispensasi penyampaian SPM, dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L (Jumlah SPM yang diterbitkan K/L termasuk jumlah SPM yang salah/ditolak) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Dispensasi SPM}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

- l. Pagu Minus, dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Pagu Minus}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$$

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan setiap bulannya dengan mengacu kepada realisasi dua belas komponen yang terdapat pada Monev PA Pada Aplikasi OM- SPAN. Target nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2024 ini adalah sebesar 92,1 dengan periode pelaporan adalah semester sehingga belum dilakukan pengukuran pada triwulan ini.

Indikator Kinerja (IK-17) : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA/KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Pengukuran indikator ini mengacu pada hasil perhitungan dari aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan dengan target sebesar 71,75 dan periode pelaporan adalah tahunan. Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Revisi Target dan Manual IKU NKA KKP TA. 2024, formula IKU ini diperoleh dari penggabungan 50% nilai kinerja perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh melalui pengukuran atas:

- a. Variabel efektivitas (bobot 75%) yang didasarkan pada capaian Rincian Output (RO) pada level satuan kerja, capaian indikator kinerja program pada level unit Eselon I, dan capaian indikator kinerja sasaran strategis pada level K/L, dan;
- b. Variabel efisiensi (bobot 25%) yang didasarkan pada hasil perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks standar biaya keluaran (SBK) sesuai PMK Nomor 113 tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan telah melakukan pemetaan RO pada RKA-K/L TA. 2026 yang diwajibkan menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) sebagai dasar penilaian kinerja perencanaan anggaran TA. 2026.

Pengukuran indikator ini mengacu pada hasil perhitungan dari aplikasi Monev Kemenkeu dengan target sebesar 71,75 dan periode pelaporan adalah tahunan sehingga belum dapat dilakukan pengukuran pada triwulan ini.

Indikator Kinerja (IK-18) : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indikator ini merupakan indikator IKU baru yang menunjukkan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Perhitungan IKU ini melihat dari hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Persyarata layanan, kemudahan prosedur, waktu penyelesaian,

kesesuaian biaya, kesesuaian produk, kecepatan produk, kemudahan fitur/kemampuan petugas, kualitas isi/sarana, layanan konsultasi). Hasil perhitungan ini diperoleh dari aplikasi SI SUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Target IKU ini sebesar 88,80 dengan periode pelaporan adalah triwulan. Adapun capaian pada IKU ini tersaji pada tabel di bawah ini:

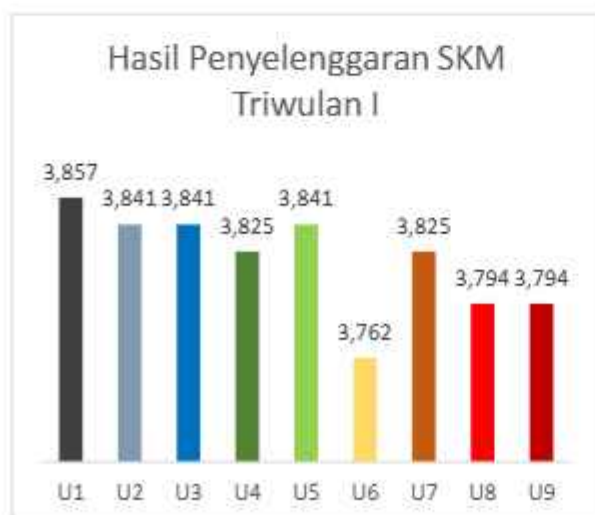
Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan – 5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Indikator Kinerja – 18					Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan I Tahun 2021 – 2025					Realisasi Tahun 2026				
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realiasi thd Target Tahun 2026
N/A	N/A	N/A	92,14	93,10	88,80	88,80	95,50	107,50	107,50

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target adalah sebesar 95,50 atau 107,50% dari target tahunan. Jumlah responden pada triwulan I ini berjumlah 63 orang. Seluruh unsur pelayanan (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7

Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi) mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,74. Adapun rincian hasil SKM terlampir sebagaimana grafik di samping.



Grafik 14. Grafik Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan capaian IKU pada triwulan di tahun sebelumnya,



capaian pada tahun ini naik sebesar 2,4 poin. Jumlah responden di tahun ini tidak sebanyak responden triwulan tahun lalu yaitu sebanyak 63 orang, namun kualitas pengisian lebih baik daripada tahun sebelumnya.

Grafik 15. Perbandingan Capaian SKM Triwulan I Tahun 2024 – 2026

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, IKU ini telah mencapai target sebesar 107,5%. Capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan utamanya responden yang belum mencapai batas minimal yaitu 100 orang.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Pencapaian IKU ini adalah sebesar 95,50 atau 107,50% yang melebihi dari target triwulan I tahun 2026. Semua unsur pelayanan mendapatkan nilai di atas rata-rata yaitu 3,74 dan unsur persyaratan layanan mendapatkan nilai paling tinggi yaitu sebesar 3,857 dengan unsur kecepatan respon/kompetensi petugas mendapatkan nilai terendah yaitu 3,762. Jumlah responden di triwulan ini juga mengalami penurunan dengan total responden hanya 63 orang. Perlu peningkatan jumlah pengisian responden SKM agar mencapai batas minimal yaitu 100 orang, misalnya dengan sering mengingatkan pengguna jasa untuk melakukan pengisian SKM di pelayanan terpadu.

5) Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian IKU yang telah dilakukan pada triwulan I ini adalah terselenggaranya rapat evaluasi pelayanan publik tahun 2025 yang dipimpin oleh Kasubag Umum serta diikuti oleh Kepala Satker BPPMHKP, Kepala Satwas PSDKP Kendari, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendari, Koordinator Penyuluh Perikanan Kendari, Kepala Balai Karantina Kesehatan Kelas I Kendari, Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio



Kendari, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kendari dan Direktur PD. Utama Sultra (SPBN). Dalam kegiatan rapat hari ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan pelayanan, baik yang telah sesuai dengan standar SOP maupun berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan pengguna jasa pelabuhan.

Gambar 32. Rapat Evaluasi Pelayanan PPS Kendari Tahun 2025

Selain itu, di media sosial PPS Kendari juga dilakukan publikasi hasil SKM triwulan I.



Gambar 33. Publikasi Nilai SKM Triwulan I pada Sosial Media

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada tahun 2026 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp56.591.349.000 sesuai dengan DIPA Ditjen Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2026. Realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp5.616.972.701 atau 10,64%. Adapun rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 20. Pagu dan Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Nilai (Rp)	Capaian (%)
1.	Pegawai	12.366.236.000	3.430.721.529	27.74
2.	Barang	9.583.534.000	1.952.670.263	20.38
3.	Modal	34.641.579.000	0	0
Jumlah		56.591.349.000	5.616.972.701	10.64

Tabel 21. Pagu dan Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Kegiatan

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Nilai (Rp)	Capaian (%)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	38.765.585.000	95.339.709	0.25
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	17.825.764.000	5.383.391.792	30.43
Jumlah		56.591.349.000	5.616.972.701	10.64

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan
Tindaklanjut Rekomendasi Periode
Sebelumnya
Rekomendasi Tindaklanjut

.....85

.....85

.....86



BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari merupakan salah satu unit eselon eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra PPS Kendari dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Triwulan I Tahun 2026 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama triwulan I Tahun 2026. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Dalam rangka peningkatan kinerja PPS Kendari, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di triwulan selanjutnya. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, pada Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) PPS Kendari sebesar 114,2 atau berpredikat **Istimewa**. Capaian keseluruhan indikator yang dilaporkan pada triwulan ini adalah sebanyak sebanyak 5 (lima) IKU & IKM yang bernilai Istimewa (nilai di atas 110), dan 3 (Tiga) IKU & IKM yang bernilai Baik (nilai 90- <110). Hasil evaluasi realisasi kegiatan dan anggaran pada triwulan I tahun 2026 tercapai Rp5.616.972.701 atau sebesar 10,64% dari total pagu sebesar Rp56.591.349.000.

4.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Adapun rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya yaitu triwulan IV tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti pada periode ini yaitu:

1. Melakukan monitoring IKPA secara berkala dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kanwil Sulawesi Tenggara serta Sekretariat

Ditjen Perikanan Tangkap perihal pengelolaan anggaran PHLN. (*Data dukung terlampir*)

2. Melakukan rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya. (*Data dukung terlampir*)

4.3. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari triwulan I tahun 2026, rekomendasi/hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja guna pencapaian target tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian nilai kinerja pelabuhan yang memiliki nilai fluktuatif pada bulan Februari.
2. Melakukan rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Asep Saepulloh**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap,



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,



Asep Saepulloh

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SABARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)	7,745.41
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat	2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton)	16.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3 Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87,5
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85
		6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	81
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	33
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	3739
		9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	75,5
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	86
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88,2
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	84,5
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	77

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	82
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	92,1
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	71,75
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88,8

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	38.765.585.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	17.825.764.000
Total Anggaran PPS Kendari Tahun 2026		56.591.349.000

Jakarta, 14 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap,


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,


Asep Saepulloh

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN I TAHUN 2026





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Rasdiana Alimuddin**

Jabatan : Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap,

Lotharia Latif

Pihak Pertama
Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,

Rasdiana Alimuddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)	7,745.41
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton)	16.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87,5
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	81
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	33
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	3739
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	86
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88,2
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	84,5
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	77

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		15 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	82
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	92,1
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	71,75
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88,8

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	38.765.585.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	17.825.764.000
Total Anggaran PPS Kendari Tahun 2026		56.591.349.000

Jakarta, Februari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap,

Lotharia Latif

Pihak Pertama
Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,



Rasdiana Alimuddin

LAMPIRAN

TINDAKLANJUT TRIWULAN IV TAHUN 2025

Melakukan monitoring IKPA secara berkala dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kanwil Sulawesi Tenggara serta Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap perihal pengelolaan anggaran PHLN





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

JALAN SAMUDERA NO. 1 PUDAY, KENDARI, SULAWESI TENGGARA 93234

LAMAN www.kkp.go.id SUREL pps.kendari@kkp.go.id

Nomor : B.4118/PPSK/RC.420/XII/2025 23 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Monitoring Capaian IKPA PPS Kendari Tahun 2025

Yth. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap
di Jakarta

Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025, bersama ini kami sampaikan terkait capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada satuan kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan.

Tidak tercapainya capaian IKPA tersebut secara utama disebabkan oleh tidak terserapnya anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dengan nilai sebesar Rp28.126.000.000 pada akun 533111 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan). Anggaran PHLN dimaksud telah dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaan tidak dapat direalisasikan. Kondisi tidak terserapnya anggaran PHLN tersebut merupakan dampak dari faktor-faktor yang berada di luar kewenangan dan kendali PPS Kendari, sehingga secara objektif tidak dapat dicegah maupun diintervensi oleh satuan kerja. Akibatnya, nilai penyerapan anggaran menjadi tidak optimal dan secara langsung memengaruhi perhitungan serta capaian IKPA PPS Kendari.

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan pertimbangan lebih lanjut. Atas perhatian dan perkenanan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Asep Saepulloh

Tembusan:
Direktur Kepelabuhanan Perikanan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
JALAN SAMUDERA NO. 1 PUDAY, KENDARI, SULAWESI TENGGARA 93234
LAMAM www.kkp.go.id SUREL pps.kendari@kkp.go.id

Nomor : B.306/PPSK/KU.530/I/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permintaan Data Daftar Sisa PHLN Satker
PPS Kendari (537695)

23 Januari 2026

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Khusus Pinjaman dan Hibah
di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka penambahan anggaran PHLN tahun 2026, Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Kode Satker 537695) mengajukan permintaan data daftar sisa PHLN.
2. Permintaan data tersebut diperlukan dalam rangka perubahan pinjaman luar negeri berupa lanjutan pelaksanaan kegiatan pinjaman yang termasuk dalam Rincian Output (RO) Prioritas Nasional, serta digunakan sebagai dasar revisi penambahan anggaran PHLN Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari sisa anggaran tahun 2025.
3. Sisa anggaran Tahun Anggaran 2025 tersebut tidak dapat direalisasikan karena terdapat kegiatan yang belum memperoleh persetujuan dari pemberi pinjaman, serta proses lelang konstruksi yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
4. Adapun rincian PHLN yang akan diluncurkan adalah sebagai berikut:
 - a. Loan/Register : CID 110901 11XEVV3A
Nama Proyek : *Outer Ring Fishing Port Development (Eco Fishing Port)*
Sisa Anggaran Tahun 2025 : Rp28.126.000.000
5. Sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi permintaan dimaksud, kami lampirkan Daftar Sisa PHLN sebagaimana terlampir

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan pertimbangan lebih lanjut. Atas perhatian dan perkenanan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Asep Saepulloh

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap
2. Direktur Kepelabuhanan Perikanan

DAFTAR SISA PHLN/PHDN

Nama Satker : PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
 Kode Satker : 537695
 Nomor DIPA : 032.03.1.537695/2025
 Cara Penarikan : PEMBAYARAN LANGSUNG

NO.	LOAN/ REGISTER	KODE KEGIATAN/ KRO/RO/ KELOMPOK AKUN	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI SP3/SP2D (Rp)	SALDO (Rp)	REALISASI PENERBITAN WA		KETERANGAN
						RUPIAH	VALAS (EUR)	
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8	9
1	CID 1109 01/ 11XEVV3A	2338/RBQ/004/533111	28.126.000.000,00	0,00	28.126.000.000,00			Last Disbursement Date: 22 Desember 2028
	Total		28.126.000.000,00	0,00	28.126.000.000,00			

Kendari, 23 Januari 2026
 Kuasa Pengguna Anggaran

Mengetahui
 Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Suharno
 NIP. 19740327 199402 1003

Asep Saepulloh
 NIP. 19660604 199905 1 005



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN
DAN HIBAH

Gedung KPPN Lantai 3, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat 10120
Telepon (021) 3516670, 3516658, 3842271; Faksimile: (021) 3842271

Nomor : S-102/KPN.1208/2026
Sifat : Segera
Lampiran : satu berkas
Hal : Pengesahan Sisa Dana PHLN

11 Februari 2026

Yth. KPA Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (537695)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B.306/PPSK/KU.530/II/2026 tanggal 23 Januari 2026 mengenai Permohonan Pengesahan Sisa Dana PHLN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (537695) nomor register loan 11XEVV3A yang kami terima secara benar dan lengkap pada tanggal 10 Februari 2026, bersama ini disampaikan pengesahan daftar tersebut sesuai permintaan Saudara, dengan rincian sebagai berikut.

NO	KODE REGISTER HIBAH	KODE KEGIATAN /KRO	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SALDO (RP)
1	11XEVV3A	2338.RBQ	28.126.000.000	-	28.126.000.000
TOTAL			28.126.000.000	-	28.126.000.000

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Khusus
Pinjaman dan Hibah



Ditandatangani secara elektronik
Suharno

Layanan KPPN KPH tidak berbiaya (nol rupiah)
Mohon untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun terkait layanan KPPN KPH



DAFTAR SISA PHLN/PHDN

Nama Satker : PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
 Kode Satker : 537695
 Nomor DIPA : 032.03.1.537695/2025
 Cara Penarikan : PEMBAYARAN LANGSUNG

NO.	LOAN/ REGISTER	KODE KEGIATAN/ KRO/RO/ KELOMPOK AKUN	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI SP3/SP2D (Rp)	SALDO (Rp)	REALISASI PENERBITAN WA		KETERANGAN
						RUPIAH	VALAS (EUR)	
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8	9
1	CID 1109 01/ 11XEVV3A	2338/RBQ/004/533111	28.126.000.000,00	0,00	28.126.000.000,00			Last Disbursement Date: 22 Desember 2028
	Total		28.126.000.000,00	0,00	28.126.000.000,00			

Kendari, 23 Januari 2026
 Kuasa Pengguna Anggaran

Mengetahui
 Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah



Suharno
 NIP. 19740327 199402 1003



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Asep Saepulloh
 NIP. 19660604 199905 1 005



LAMPIRAN

TINDAKLANJUT TRIWULAN IV TAHUN 2025

Melakukan rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya



NOTULEN RAPAT

A. Dasar:

Instruksi Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tanggal 5 Januari 2026

B. Pelaksanaan:

Hari/Tanggal	: Senin, 5 Januari 2026
Jam	: 08.00 WITA - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Cakalang
Agenda	: Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja
Peserta	: Daftar Hadir/Dokumentasi Terlampir

C. Hasil Rapat:

Pada hari ini, Senin, 5 Januari 2026 telah dilaksanakan rapat dalam rangka Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja Pegawai di ruang rapat Cakalang. Setelah melalui diskusi diperoleh risalah rapat sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Rapat yang dihadiri oleh para ketua tim kerja, dan perwakilan anggota dari setiap tim kerja;

2. Pengarahan Kepala PPS Kendari:

- a. Terkait KNMP di Konawe yang akan diresmikan oleh Presiden pada Tanggal 14 Januari 2026, dipersiapkan dengan baik, Pemerintahan daerah termasuk Gubernur turut semangat yang tinggi
- b. Sebaiknya saling bantu dan selalu mengontrol kondisi yang ada di KNMP, dari dinas provinsi akan berkantor KNMP, dan untuk KKP akan berkantor di Pengelola KNMP, sebaiknya di pasang AC, sehingga nyaman untuk bekerja
- c. Terkait Perekrutan PJLP, melakukan proses perekrutan dengan baik, Administrasi dilengkapi, dan buat surat penugasan dari Kepala Pelabuhan, dan untuk menutupi kekosongan pegawai yang sudah mengundurkan diri sebanyak 3 orang karena sudah terangkat jadi PNS, akan digantikan dengan yang baru, untuk penempatannya akan ditentukan oleh Dukman
- d. Terkait SK kegiatan untuk di tahun 2026, baik itu dari tim pengelola, keuangan, Pejabat Pengadaan, segera dibuat konsepnya
- e. Informasi mengenai pemecatan 2 petugas enumerator yang dinilai langsung dari staff Operasional PPS yang dinilai melalui aplikasi, sebaiknya, diperhatikan lagi, diskusikan dengan baik, nilai buruknya dari sisi yang mana

sebelum megambil keputusan karena sangat berdampak bagi kontram kerja Enumarator

- f. Terkait Pemilihan pegawai telatan di Semester II sudah harus di persiapkan
- g. Terakit Penempatan Lokasi CPNS setelah Kegiatan peresmian KNMP oleh Prisedien, Dukman buat surat penugasan dan sebar ke Pelabuhan binaan yang sebanyak 8 orang
- h. Membuat Konsep Surat untuk program usulan dengan melengkapi administrasi mengingat keterbatasan ahli pengukuran kapal, sehinga perlu adanya penambahan dengan cara mengikuti pelatihan
- i. Terkait Pengukuran Kapal, Dukman buat SPT an, Romi yang akan dibiayai oleh Perusahaan PT. KBS
- j. Terkait Belanja atau pemenuhan data dukung SPJ, lengkapi data dukungnya melalui foto tagging yang posisi awal (before) dan posisi terakhir (After) untuk pertanggung jawabnya
- k. Buat Penugasan 3 PJLP yang sudam masuk, 2 PJIP akan di tempatkan di PU sebagai petugas Rusunamawa, dan Pengelola Air, dan 1 di tempatkan di Dukman sebagai kehumasan

3. Tim Kerja Kesyahbandaran:

- a. Terkai bantuan perizinan, atensi ke pak direktur usaha penangkapan ikan belum ada progresdari 69 kapal yang diajukan baru 6 yang sudah terbit perizinannya.
- b. Pengarahan dan Pentunjuk terkait Penempatan Lokasi CPNS ke lokasi yang sudah disepakati dan ditinjau sesuai kebutuhan
- c. Mengenai CIO, yang sebelumnya sudah follow up ke pak Roy yang bertugas sebagai pengukur kapal perikanan, sebaiknya perlu ada tambahan petugas pengukutran kapal perikanan, dengan mengikuti pelatihan.
- d. Setelah peninjauan Penempatan CPNS an. Andrianto yang sebelumnya di PP Kasiwa menjadi PP. Lero

4. Tim Kerja TKSP:

- a. Ketersediaan Jumlah stok Solar di Tahun 2026 sudah menipis, apabila kedepannya melakukan pengisian solar, sebaiknya mengisi 1,5 Ton ayang akan di isi secara bertahap.

5. Tim Kerja Operasional :

- a. Menindaklanjuti Pegawai ayang akan berkantor di KNMP, akan dilakukan Pemasangan AC

- b. Terkait Bu Mega yang jabatannya P3T sebaiknya sudah bisa membantu dan dijadwalkan piket kerjanya di tim operasional sambil mengerjakan tugas di persuratan

6. Tim Kerja PU :

- a. Capaian Iku di Tim PU sebanyak 7.388.000.000
- b. Piutang Negara per 31 Desember 2025 mencapai 319.000.000 terkait pengguna jasa umum
- a. Kekurangan SDM di PU Novi, Isti, Pak Yusuf pengelola air yang sudah pensiun, dan kedepannya Pak Latiro juga akan pensiun, seabiknya ada penambahan petugas yang akan menggantikan Kekosongan tersebut

7. Tim Kerja Dukman :

- a. Capaian IKU PNBPN sebanyak 99,44% diluar 28.000.000.000
- b. Anggaran di Tahun 2026, sebanyak 2.400.000.000, BGA kena blokir (PNBP), terakit teknis anggarannya menunggu kebijakan
- c. Capaian IP ASN sebanyak 90,24%
- d. Pemelihan Reward akan dilakukan diatas Tanggal 14, dengan menunggu rekapan absen dan SKP Pegawai
- e. Perekrutan PJLP yang baru sebanyak 3 orang, yang ditempatkan 2 di Pu dan 1 di Humas
- f. Capaian IKU di masing-masing tim kerja buat LCK (Lambat capaian Kerja) id lengkapi alasan tercapai dan segera disampaikan
- g. SK Penugasan untuk CPNS dengan Penempatan di Pelabuhan Binaan akan dikeluarkan per Tanggal 1 datu 2 Februari 2026
- h. Upadte WBK Tahun 2025 di Apload melalui Googrl Drive
- i. Terkait Bu Mega untuk sekarang akan dibuat jadwal Kerja, Mengingat Persuratan akan kekosongan, Ibu rully akan mengambil Cutin Lahiran, jadi Bu Mega masih menhendel Persuratan dan akan dibuatkan jawal kerja diluar jam kerja atau di hari libur.
- j. Menghimbau ke Ketuam Tim Kerja untuk mengingatkan ke staffnya untuk memakai atribut baru mengganti atribut yang lama

Notulis,



Emiliana

DOKUMENTASI RAPAT MONIROTING DAN EVALUASI KINERJA

DAFTAR HADIR RAPAT



Tempat: Samudera
Jem: 18.00 - 19.00
Acara: Rapat

DAFTAR HADIR RAPAT

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Alp. Supriatna	Kalabahi	
2.	Purwan To	TKSP	
3.	Pandian A	Dikem	
4.	Pur. Lx. Luranga	Pu	
5.	Budi Santoso	Pelayanan Usaha	
6.	M. HIKAM	Analisis SDAK Berjasa	
7.	M. HIKAM	Kesya Bndra	
8.	Taisul Tump	KESYABANDRA	
9.	Kahirin	TKSP	
10.	Dan Ayu Diah W.	TKSP	
11.	Saiful R.	TKSP	
12.	Emilena	Pukman	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
B. Samudera No. 1 Pukay, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, 93233
Telp. (0401) 3390868 Fax. (0401) 3390868 Email: info@psk.kendari.go.id

Layanan Pengiriman



GOVERNANCE

NOTULEN RAPAT

A. Dasar:

Surat Kepala Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Nomor 151/PPSK.TU.330/II/2026 tanggal 21 Januari 2026 Hal. Rapat Evaluasi Kegiatan 2025 dan Rencana Kerja 2026

B. Pelaksanaan:

Hari/Tanggal	: Kamis, 22 Januari 2026
Jam	: 08.30 WITA - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Cakalang
Agenda	: Rapat Evaluasi Kegiatan 2025 dan Rencana Kerja 2026
Peserta	: Daftar Hadir/Dokumentasi Terlampir

C. Hasil Rapat:

Pada hari ini, Kamis, 22 Januari 2026 telah dilaksanakan rapat dalam rangka Rapat Evaluasi Kegiatan 2025 dan Rencana Kerja 2026 di ruang rapat Cakalang. Setelah melalui diskusi diperoleh risalah rapat sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Rapat yang dihadiri oleh para ketua tim kerja, pengelola anggaran, pengelola Keuangan dan perwakilan anggota dari setiap tim kerja;

2. Pengarahan Kepala PPS Kendari:

- Terkait KNMP di Konawe yang akan diresmikan baik oleh Presiden maupun menteri, dipersiapkan dengan baik dari sekarang
- Mengavaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan, mengingatkan para katimja melaporkan semua capaian kerja yang sudah tercapai
- Untuk Tim Dukman terkait LK Keuangan yang ditangani oleh Pak Wayan dan Pak Suworsono dikerjakan dengan baik, jangan menunda Pekerjaan yang merupakan tugas dan fungsi kita sebagai pegawai PPS Kendari dimana yang diberi tanggungjawab akan hal itu, dalam menata suatu organisasi
- Terkait Pelaporan LK sudah dilaporkan tinggal menunggu asistensi dari inspektorat
- Untuk Dukman, sampai sekarang belum menerima surat penugasan PJLP dan ASN, untuk Katimja silahkan buat konsep sesuai kebutuhan, dan semua katimja sebaiknya paraf sebagai pendukung untuk saling mengetahui
- Mengingatkan bahwa melakukan pergeseran anggota harus dilaporkan terlebih dahulu, Memberi tugas lain tanpa melaporkan kepada pemberi tugas

itu merupakan kesalahan, karena Kepala Pelabuhan memiliki otoritas, baik itu pergeseran anggota dengan pertimbangan alasan kenapa dipindahkan.

- g. Kontrak Vendor harus segera dilakukan
- h. Terkait pemilihan pegawai teladan di semester 2, sebaiknya sudah mulai direncanakan
- i. Terkait SK WBK, sebaiknya dibuatkan SK WBK terbaru
- j. Rumah dinas yang masih kosong sebaiknya ditawarkan kepada pegawai yang mau tinggal dan mau memelihara dirumah dinas tersebut
- k. Dibuatkan SK pengadaan Barang & jasa (PBJ) atas nama Pak Mukhtar dan Pak Purwanto. Diklat PBJ itu krusial, dipersilahkan siapa saja yang mau ikut, silahkan mendaftar
- l. Apabila ada pegawai yang akan naik pangkat, jangan diberikan nilai SKP yang rendah, minimal baik atau sangat baik
- m. Dari Tim Kesyahbandaran harus selalu membuat pengumuman cuaca ektrim
- n. Pengawasan BBM Bersubsidi, harus hati-hati ini harus diinvestigasi langsung dari syahbandar
- o. Terkait Kebersihan di laut, diskusikan terkait anggaran syahbandar untuk membeli kantong plastik untuk mengurangi sampah yang ada dilaut
- p. Ruang Pelayanan Terpadu, dan Ruang Kepatuhan dikondisikan dengan baik, kalau ada permintaan informasi atau mis komunikasi sebaiknya dikomunikasikan dan berikan penjelasan yang baik
- q. PYMHD rekon lagi dengan syahbandar dan Pelayanan Usaha. Pelayanan Usaha, sebaiknya Membuat Evaluasi Proses Mengenai kontrak Kerja dengan Perusahaan baik itu yang masih ada tunggakan ataupun yang hal hal yang perlu
- r. Mengingatkan masing-masing perusahaan, terkait pemeliharaan ketertiban, kebersihan dan keindahan, buat surat keperusahaan surat teguran 1 sampai 3 kali, apabila tidak mengindahkan sebaiknya diberikan sanksi tegas
- s. Target PNBPN jangan mengikuti keinginan pusat, sebagai catat Pelayana usaha dan Dukman itu harus sesuai dengan estimasi dan strategi
- t. Untuk TKSP, selalu mengecek kebutuhan SARPRAS, baik itu untuk pelayanan publik, atau barang yang krusial, sebaiknya selalu ada barang cadangan yang sewaktu waktu dibutuhkan ada stok yang dimiliki serta mengingatkan Katimja TKSP sampai sekarang belum ada nama operator alat berat, alat berat ini masuk sebagai sumber PNBPN

- u. Untuk Operasional, terkait gaji yang dibayarkan terhitung hanya 10 bulan, dan tersisa 2 bulan yang tidak terbayarkan, difikirkan dari sekarang bagaimana kita bisa membantu mereka, karena merka bekerja untuk mencari nafkah. Lakukan Pembinaan Petugas Enumerator secara periodik untuk meningkatkan pendapatan PNB
- v. Operasional sellau melakukan evaluasi capian PNB dan berkolaborasi dengan syahbandar untuk mencari alasan sehingga ada penambahan hasil investigasi kenapa tidak tercapai.
- w. Mengingatkan Pegawai yang diberi amanah menjadi PPK KNMP, terkait barang BMN, tugas PPK untu hanya memproses ketika sudah melakukan kontrak kerja baik itu RAB dan gambarnya, ketika selesai buat surat BAST antara PPK dengan penyedia atas dasar rekomendasi sudah dievaluasi oleh konsultan dan konsultan inspektorat untuk mengurangi beban kerja tugas PPK itu melaporkan kepada KPA kalau pekerjaannya sudah selesai. KNMP ketika selesai tugasnya Menteri.
- x. Kuasa pengguna barang (KPB) terbagi menjadi 3 bagian yaitu KPB Satker, KPB staker esalon 1, dan KPB tingkat menteri (menteri dan itjen) Barang BMn diterima KPB diserahkan ke KPA, KPA membuat PSP (penetapan status barang). PPK KNMP itu penerima hasil pekerjaan, lalu membuat BAST dalam bentuk kertas, PPK membuat laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan 100% dilampirkan di hasil pekerjaannya
- y. Dukman, buat nota dinas, kaitannya dengan pelayanan prima dan integritas baik itu terlinat dengan KNMP maupun tidak
- z. Dukman, buat penugasan pegawai dan di evaluasi yang bertugas dilapangan baik itu internal maupun yang diluar dan buat Surat tugas Per Februari terkait penugasan CPNS sesuai kebutuhan di masing masing pelabuhan binaan

3. Masukan dari Tim Kerja Kesyahbandaran :

- a. Capaian Kinerja di tahun 2025, terkait pelayanan syahbandar, STBLK SHTI dll mencapai target 85,7%, Tingkat penggunaan pesyaratan awak kapal, mencapai dengan target 0,25 realisasi, 0,58% Kapal Perikanan izin daerah, kalaikan target 233 kapal realisasi 369 atau 120%
- b. Terkait cuaca buruk, pihak syahbandar selalu melakukan monitoring di BMKG, dan layar terkait cuaca buruk di monitor yang ada di pelayanan terpadu untuk

- mendapatkan informasi peringatan gelombang tinggi, dan selalu menginformasikan di grup pengurus kapal, dan disampaikan di media sosial
- c. Progres perizinan kapal selalu bekerja sama dengan operasional, perpanjangan perizinan selalu menyampaikan ke pemilik kapal yang belum melakukan evaluasi, sampai saat ini sudah melakukan evaluasi ada 11 dari perpangkalan, dan tidak mengajukan evaluasi sebanyak 12, dengan kendala tidak mengajukan izin karena oss, combine dengan perizinan yang di followup 31 Januari 2026,
 - d. Perpanjangan SIFI harus dimaksimalkan dan itu sudah di sosialisasikan.
 - e. Terkait penggunaan BBM subsidi diluar penggunaan melaut yang bukan peruntukannya akan dikonsultasikan dan dikomunikasikan, untuk evaluasi BBM Subsidi dengan selalu mengontrol STBLK dan Logbook, kuotanya harus dipegang betul dan betul adanya
 - f. Terkait Kebersihan laut sesuai edaran Dirjen, sudah dilaksanakan dan dibantu oleh dukman untuk menyediakan kantong sampah dan karung
 - g. Ruang Pelayanan dan ruang kepatuhan sudah berjalan dan ada beberapa keluhan oleh pengguna jasa dimana SPB sering terlambat dengan kendala HPK yang dikeluarkan oleh PSDKP, selalu menyampaikan harus diatur jangan sampai terlambat.
 - h. Tim Pelabuhan binaan di tahun 2026 di support ATK, internet dan bahan komputer di pelabuhan mangolo, lappa, lonrae, kasiwa dan sodohoa
 - i. Surat Tugas untuk CPNS sementara dibuat, CPNS jangan terlalu diberikan tugas yang berat dalam penugasan
 - j. Evaluasi capaian PNBPN non SDA sekarang berpangkalan target 170 yang terbit, 111, belum terbit 15 kapal yang belum mengisi evaluasi sesuai dengan aplikasi
 - k. Meminimalisir Los data dan selalu memerhatikan dan memantau pembongkaran kapal, dan selalu didokumentasikan

4. Masukan dari Tim Kerja Operasional :

- a. Tahun 2024 sampai tahun 2025 produksi mengalami kenaikan
- b. Terkait mendata, sudah terbatukan dengan adanya megang, dan tim operasional juga membantu mendata dengan menyesuaikan shift apabila ada kapal di ahri tertentu banyak
- c. Target PNBPN sebanyak 29 Juta baru tercapai 5,6 atau 5,1 % baru stenagh sebanyak 3.35 m

- d. Terkait KNMP yang sudah selesai pekerjaan sudah serah terima dan dibuatkan BAST terkait pekerjaan yang sudah 100%

Notulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emiliana', written over a horizontal line.

Emiliana

DOKUMENTASI RAPAT MONIROTING DAN EVALUASI KINERJA



DAFTAR HADIR RAPAT



DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal: Kamis, 22 Januari 2026
 Jam: 08.30
 Acara/Kegiatan: Rapat Evaluasi Kegiatan 2025 dan Rencana Kerja 2026

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Ascp. S	Kalabank	
2.	M. IKRAM	Kesgabkandaraan	
3.	MUKHTAR	Operasional	
4.	Pantian. a	Anten	
5.	Budi Santoso	Budi Santoso	
6.	I Wayan Budiatk	Dukuh	
7.	Purwanto	TKSP	
8.	SYLVIANI AMIR	OPS	
9.	Anchiganto	Kesgabkandaraan	
10.	LEHA KURNIAWATI	KESYAH BANDARAN	
11.	Maile Berry	Kesgabkandaraan	
12.	Muli Purwanto	Kesgabkandaraan	
13.	Katirin	TKSP	
14.	Karna Yusuf	Kesgabkandaraan	
15.	Nurul Hikmah	Amans BSBKandaraan	
16.	Ernawati Spurnaw	PU	
17.	Sapta Kurniawan Hf	TKSP	
18.	Levi Rumangsa	PU	
19.	Harisadnan Aprilianto	OPS	
20.	Sn Hermawati	ops	

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

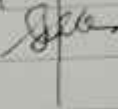
Jl. Samudera No. 3 Paday, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, 93223
 Telp. (0401) 3180868 Fax. (0401) 3180868 Email : info@ppk-sd.com



VERIFIKASI

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal	1
Jam	2
Acara/Kegiatan	3

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Widada Iri Hartuliani	RSP	
2.	Emilia	PJ	
3.	Saiful Ramadani	TKSP	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Layanan Pengaduan

 Springer

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
Jl. Samudera No.1 Puda, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, 93233
 Telp. (0401) 3190868 Fax. (0401) 3190868 Email : info@pskksa@yahoo.co.id